



SI-MERI

**SISTEM INFORMASI
MONITORING MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI**

**PANDUAN PENGGUNA
(MODUL MANAJEMEN RISIKO)**

**SISTEM INFORMASI
MONITORING MANAJEMEN RISIKO
TERINTEGRASI**

2025

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAFTAR ISI	1
TENTANG SI-MERI	3
MEMULAI SI-MERI	7
PENGELOLAAN PENGGUNA	8
1. Unit Pemilik Risiko (UPR)	8
2. Unit Kepatuhan Intern (UKI)	8
HALAMAN DASHBOARD	9
1. Risiko Tertinggi Pada Perangkat Daerah	9
2. Risiko Strategis Pemda	10
3. Risiko Strategis Perangkat Daerah	11
4. Risiko Fraud	11
5. Dampak Katastropik	12
6. Risiko Mitra	13
7. Pemetaan Risiko	16
8. Mitigasi Risiko	17
▪ Risiko Diterima	18
▪ Tangani Risiko	20
▪ Risk Transference & Avoidance	21
PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO	23
1. Sasaran:	26
2. Indikator Unit Kerja:	26
3. Daftar Pemangku Kepentingan (Stakeholders)	27
4. Peraturan terkait dengan TUPOKSI:	27
PROSES BISNIS	28
MANAJEMEN RISIKO	33
1. Identifikasi Risiko	34
2. Rencana Penanganan Risiko	43
3. Realisasi Penanganan Risiko	46
4. Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Event)	52
LAPORAN MANAJEMEN RISIKO	57
1. Buku Manajemen Risiko	57
2. Laporan Piagam Manajemen Risiko	58
4. Laporan Daftar Risiko.	62
5. Laporan Rencana Penanganan Risiko	64
6. Laporan Realisasi Penanganan Risiko	65

7. Laporan Daftar Risiko Strategis Pemda	67
8. Laporan Daftar Risiko Mitra Pd	69
9. Laporan Daftar Risiko Fraud.	70
10. Laporan Hasil Rivi - Inspektorat	72
KONTAK KAMI	74

TENTANG SI-MERI

Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko Tertintegrasi (SI-MERI) merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memantau dan mengelola risiko-risiko yang dihadapi secara efektif dan efisien. SI-MERI mengintegrasikan berbagai informasi terkait risiko yang ada di seluruh unit organisasi di Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari tingkat unit kerja hingga tingkat Provinsi Sumatera Selatan, sehingga memungkinkan pemantauan risiko secara menyeluruh dan terpadu.

SI-MERI memiliki keunggulan dalam menyediakan informasi yang akurat dan real-time mengenai risiko-risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini tercapai melalui integrasi data dari berbagai sumber yang mencakup informasi tentang risiko dari berbagai unit kerja di seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Informasi yang akurat dan real-time ini memungkinkan para pemangku kepentingan, termasuk para pengambil keputusan, untuk segera mengetahui risiko-risiko yang muncul dan mengambil tindakan yang tepat.

Kecepatan dalam merespons risiko-risiko yang muncul menjadi lebih efisien karena informasi yang diberikan oleh SI-MERI selalu terupdate. Para pemangku kepentingan dapat mengakses informasi ini melalui dashboard atau laporan yang disediakan oleh sistem. Dengan demikian, tidak ada keterlambatan dalam mendapatkan informasi mengenai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Dalam konteks pengambilan keputusan, informasi yang akurat dan real-time sangat berharga. Para pengambil keputusan dapat menggunakan informasi ini untuk melakukan analisis risiko yang lebih baik dan mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan terkini. Hal ini dapat membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko yang dihadapi.

Keunggulan SI-MERI dalam menyediakan informasi yang akurat dan real-time dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan informasi yang terkini, para pengambil keputusan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi. Dengan demikian, SI-MERI dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung manajemen risiko yang efektif dan efisien di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

SI-MERI dapat membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam merencanakan strategi pengelolaan risiko yang lebih efektif. Dengan adanya informasi yang terintegrasi dan komprehensif tentang risiko-risiko yang dihadapi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang memiliki dampak terbesar dan menetapkan prioritas dalam penanganannya.

Selain itu, SI-MERI dapat membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, semua informasi terkait risiko dapat diakses dengan mudah oleh

yang lebih baik.

Dalam mengimplementasikan SI-MERI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu memperhatikan beberapa hal, seperti kebutuhan akan pelatihan dan sosialisasi bagi para pengguna sistem, serta perlunya dukungan penuh dari semua pihak terkait. Dengan mengoptimalkan penggunaan SI-MERI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan visi misi pembangunan daerah.

PETUNJUK PENGOPERASIAN

APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMETAAN RISIKO TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Petunjuk pengoperasian ini digunakan untuk memandu User OPD pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemetaan Risiko Terintegrasi Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan panduan ini diharapkan pengguna aplikasi dapat memetakan masing-masing Perangkat Daerah sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Petunjuk pengoperasian disajikan menurut tahapan yang harus dilaksanakan oleh user pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tampilan website Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemetaan Risiko Terintegrasi Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terdiri, halaman website ini terdiri dari :

1. DASHBOARD merupakan halaman utama terkait dengan kegiatan pemetaan risiko pada Perangkat Daerah;
2. ORGANISASI terdiri dari sub Penetapan Kontek Risiko dan Pegawai;
3. PROSES BISNIS terdiri dari sub menu Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja Program, Sasaran Kerja Pegawai/Indikator Kinerja Kegiatan dan Proses Bisnis;
4. MANAJEMEN RISIKO terdiri dari sub menu Identifikasi Risiko, Daftar Risiko, Rencana Penanganan Risiko, dan Realisasi Penanganan Risiko;
5. LAPORAN terdiri dari sub menu Laporan Piagam Manajemen Risiko, Laporan Daftar Penetapan Risiko, Laporan Daftar Risiko, Laporan Rencana Penanganan Risiko, Laporan Realisasi Penanganan Risiko;
6. TENTANG SI-MERI terdiri dari sub menu Tutoril, Pedoman, Kontak, Konsultan Auditor/P2UPD, dan Frequently Asked Question;
7. Pedoman layanan yang berisi ringkasan pedoman penyusunan risiko di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan , pedoman mengoperasikan layanan konsultasi bagi user dari segala tingkatan ;
8. Halaman login yang dipergunakan oleh User Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;

9. Dokumen, layanan ini berisi dokumen yang dapat diunduh oleh siapa saja yang mengakses website Konsultasi Helpdesk Pemetaan Risiko Secara Online;
10. Tim Konsultasi Pemetaan Risiko yaitu para pejabat fungsional yang dilibatkan dalam Tim Konsultasi berisi nama, jabatan, alamat email dan nomor telpon yang bisa dihubungi;
11. Hubungi, halaman yang berisi alamat kantor SI-MERI yaitu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMULAI SI-MERI



Langkah-langkah untuk melakukan login ke SI-MERI adalah sebagai berikut:

- a. Buka browser web dan masukkan alamat <https://si-meri.inspektorat.sumselfprov.go.id/> pada bar alamat.
- b. Setelah halaman web SI-MERI terbuka, klik area atau kolom berupa form login.
- c. Pada kolom "Username", masukkan username yang telah diberikan atau yang telah Anda buat untuk perangkat daerah Anda.
- d. Selanjutnya, pada kolom "Password", masukkan password yang sesuai dengan username yang dimasukkan sebelumnya.
- e. Setelah memasukkan username dan password, klik tombol "Sign In" atau "Login" untuk masuk ke dalam sistem SI-MERI.
- f. Jika informasi login yang dimasukkan benar, Anda akan diarahkan ke halaman utama atau dashboard SI-MERI. Jika tidak, sistem akan memberikan pesan kesalahan dan meminta Anda untuk memasukkan kembali informasi login dengan benar, akan muncul layar pembuka

Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan informasi login Anda dan melakukan logout dari sistem setelah selesai menggunakan SI-MERI untuk mencegah akses yang tidak sah ke akun Anda.



PENGELOLAAN PENGGUNA

Pengguna SI-MERI ,modul Manajemen Risiko (MR),diklasifikasikan berdasarkan Struktur Manajemen Risiko, terdiri dari:

1. Unit Pemilik Risiko (UPR)
2. Unit Kepatuhan Intern (UKI)
 - 2.1. UKI-T1 (Unit Organisasi)
 - 2.2. UKI-T2 (Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis)

Struktur ini membantu dalam mengorganisir dan mengelola risiko di berbagai unit atau bagian dalam organisasi. Setiap unit memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan area kerjanya masing-masing. Dengan demikian, manajemen risiko dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi di seluruh organisasi. Untuk pengaturan hak kewenangan akses modul aplikasi SI-MERI, peran pengguna (role), meliputi :

- Administrator; mengelola dan memelihara database sistem : Master Data (referensi).
- Operator; mengelola data Formulir Manajemen Risiko : UPR (Pemilik Risiko & Pengelola Risiko).

Relasi dan hirarki hak akses antar UPR diuraikan seperti pada gambar berikut.

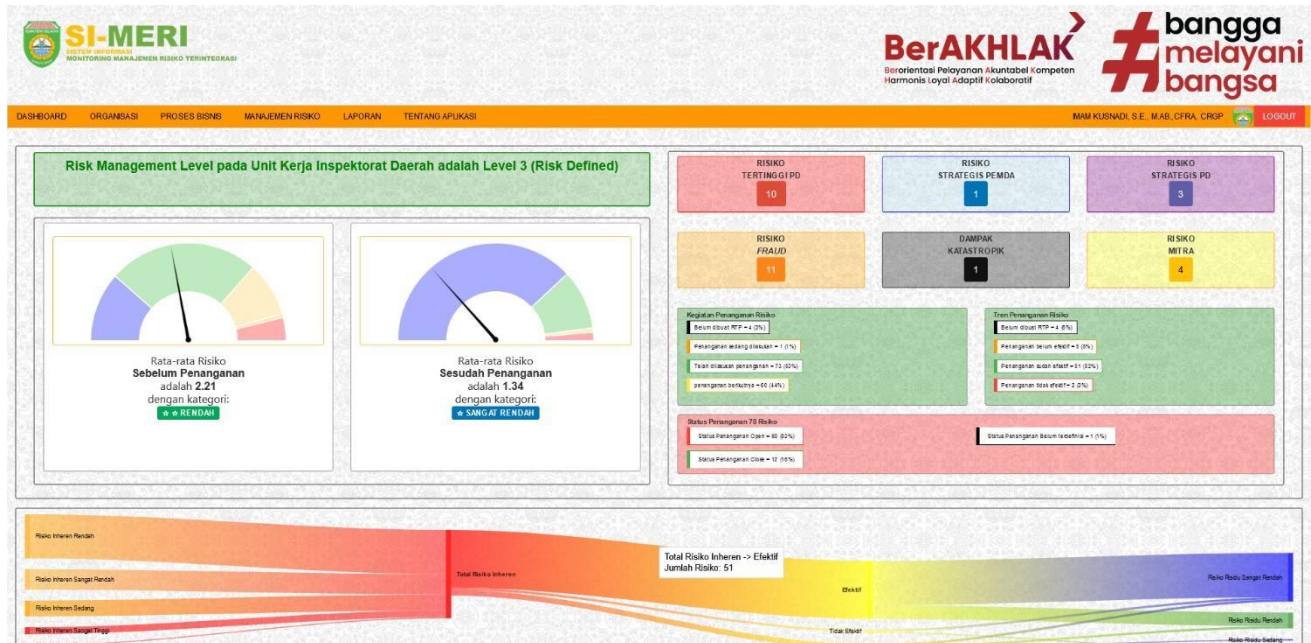
Secara struktural, UPR tingkat atas dapat mengakses dan melihat data UPR tingkat di bawahnya. Sedangkan secara garis koordinasi, antar UPR dapat mengakses dan melihat data UPR yang berada di bawah koordinasinya.

Untuk pengelolaan data Pengguna merupakan kewenangan Administrator sedangkan Pengguna dapat melakukan perubahan username dengan cara mengakses menu **Profil** pada ikon login user.



HALAMAN DASHBOARD

Setelah login berhasil, tampil halaman **Dashboard**, seperti berikut.



Dashboard SI-MERI memberikan informasi tentang rata-rata risiko sebelum dan sesudah penanganan, serta kategori risiko berdasarkan nilai rata-rata tersebut. Hal ini



menunjukkan bahwa penanganan risiko telah berhasil mengurangi tingkat risiko secara signifikan. Dashboard SI-MERI Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko Terintegrasi juga menampilkan beberapa kategori risiko yang penting untuk dipantau dan dikelola.



RISIKO TERTINGGI PADA PERANGKAT DAERAH adalah kategori risiko yang mencakup risiko-risiko dengan Total Risiko paling signifikan terhadap Perangkat Daerah. Total Risiko ini dapat dihitung berdasarkan berbagai faktor, seperti

dampak risiko terhadap tujuan organisasi, probabilitas terjadinya risiko, serta kemampuan organisasi untuk menangani risiko tersebut.

Kategori ini adalah untuk memberikan perhatian khusus pada risiko-risiko yang memiliki dampak terbesar terhadap Perangkat Daerah sehingga langkah-langkah pengendalian dan mitigasi dapat difokuskan pada risiko-risiko yang paling kritis tersebut. Dengan mengidentifikasi dan mengelola Risiko Tertinggi dengan baik, organisasi dapat mengurangi

potensi kerugian dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan mereka. seperti pada contoh dibawah ini :

10 Tingkat Risiko 10 Tertinggi - Topten High Risk									
Menampilkan 10 Data									
No	Pernyataan Risiko Penyebab Kategori Kode Risiko	PIC	Risiko Inherent	Rencana Penanganan	Rencana Tanggal Pelaksanaan	Realisasi Tanggal Pelaksanaan	Indikator Output	Risiko Residu	Status Penanganan
	Pernyataan Risiko: Ketersuaian Laporan Keuangan pada SMDA dan SPD Penyebab: Aplikasi SMDA dan SPD tidak terintegrasi Kategori Risiko: Strategis Kode Risiko: RSO-21-1020-22	 DESI SIKORTA, S.Kom.	K = 4 D = 4 TR = 16 4 - Tinggi	Melakukan Koordinasi dengan BAKUDA dan BAPPELTABANGDA	TW 1 dari 01 Feb 2022 s.d 28 Feb 2022	TW 3 s.d TW 4 dari 01 Jul 2022 s.d 30 Des 2022	Laporan Keuangan antara SMDA dan SPD sudah sesuai	K = 2 D = 1 TR = 2 1 - Sangat Rendah	High Penanganan Tuntas Rencana Penanganan Tuntas
1	Pernyataan Risiko: SKPD tertambat mendatangi LHP Penyebab: Pejabat di PD tidak memahami rekomendasi TL nya Kategori Risiko: Kepatuhan Kode Risiko: RSK-21-1106-22	 YURISMANSYAH, S.T.M.M.	K = 3 D = 5 TR = 15 5 - Sangat Tinggi	Mem sosialisasikan penyusunan TLHP kepada SKPD, dan pemeriksaan dilakukan dalam TL	TW 1 s.d TW 4 dari 03 Jan 2022 s.d 30 Des 2022	TW 3 s.d TW 4 dari 01 Jul 2022 s.d 30 Des 2022	Laporan Tindak Lanjut	K = 2 D = 3 TR = 6 3 - Rendah	High Penanganan Tuntas Rencana Penanganan Tuntas



RISIKO STRATEGIS PEMDA Risiko Strategis PEMDA merujuk pada risiko-risiko yang memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap keberhasilan sasaran strategis atau kebijakan Pemerintah Daerah. Risiko-risiko ini berkaitan

dengan faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah. Dalam manajemen risiko, penting untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola Risiko Strategis PEMDA dengan baik agar Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya dan memanfaatkan peluang yang ada.

Contohnya meliputi:

- **Perubahan Kebijakan Nasional:** Perubahan dalam kebijakan nasional yang dapat mempengaruhi program atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- **Perubahan Lingkungan Eksternal:** Perubahan dalam lingkungan eksternal, seperti kondisi ekonomi, politik, sosial, atau teknologi, yang dapat mempengaruhi program atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- **Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran, tenaga kerja, atau infrastruktur, yang dapat menghambat pelaksanaan program atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- **Ketidakpastian Hukum:** Ketidakpastian dalam interpretasi atau perubahan dalam hukum yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- **Perubahan Kebutuhan Masyarakat:** Perubahan dalam kebutuhan atau harapan masyarakat yang dapat mempengaruhi relevansi atau efektivitas program atau kebijakan Pemerintah Daerah.

Dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola Risiko Strategis PEMDA dengan baik, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam mencapai tujuan strategis mereka, seperti

Pada contoh dibawah ini:

1 Kategori Risiko - Strategis Pemerintah Daerah									
Menampilkan 10 Data									
No	Pernyataan Risiko Penyebab Kategori Risiko Kode Risiko	PIC	Risiko Inherent	Rencana Penanganan	Rencana Tanggal Pelaksanaan	Realisasi Tanggal Pelaksanaan	Indikator Output	Risiko Residu	Status Penanganan
	Pernyataan Risiko: Nilai RB tidak tercapai Penyebab: Kurang optimalnya kinerja OPD Kategori Risiko: Strategi PEMDA Kode Risiko: RSP-21-386-22	 RADEN JULIANTI MURJANAH, S.P.M.T.	K = 1 D = 3 TR = 3 1 target tercapai	Melakukan asesmen dan Melaksanakan Monitoring kepada OPD setiap triwulan	TW 1 s.d TW 3 dari 07 Mar 2022 s.d 30 Sep 2022	TW 4 dari 30 Nov 2022 s.d 15 Des 2022	Meningkatnya Nilai RB	K = 1 D = 2 TR = 2 1 target tercapai	Open Penanganan Tuntas Belum Selesai Penanganan
Menampilkan 1 sampel 1 dari 1 Data									
Sebelumnya 1 Selanjutnya									



RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

merujuk pada risiko-risiko strategis yang dapat berdampak pada keberhasilan program atau kebijakan pada Perangkat Daerah. Risiko-risiko ini juga berkaitan dengan faktor-faktor eksternal dan

internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah. Dalam manajemen risiko, penting untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola Risiko Strategis Perangkat Daerah dengan baik agar Perangkat Daerah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya dan memanfaatkan peluang yang ada, seperti pada contoh dibawah ini:

3 Kategori Risiko - Strategis Pemerintah Daerah									
Menampilkan 10 Data									
No	Pernyataan Risiko Penyebab Kategori Risiko Kode Risiko	PIC	Risiko Inherent	Rencana Penanganan	Rencana Tanggal Pelaksanaan	Realisasi Tanggal Pelaksanaan	Indikator Output	Risiko Residu	Status Penanganan
	Pernyataan Risiko: Ketidakefektifan Laporan Keuangan pada SMDA dan SPD Penyebab: Aplikasi SMDA dan SPD tidak terintegrasi Kategori Risiko: Strategis Kode Risiko: RSO-21-1029-22	 DESI SNIORITA, S.Kom.	K = 4 D = 4 TR = 16 4 target	Melakukan Koordinasi dengan BAKUDA dan BAPPELITBANGDA	TW 1 dari 01 Feb 2022 s.d 28 Feb 2022	TW 3 s.d TW 4 dari 01 Jul 2022 s.d 30 Des 2022	Laporan Keuangan antara SMDA dan SPD sudah sesuai	K = 2 D = 1 TR = 2 1 target tercapai	Open Penanganan Tuntas Belum Selesai Penanganan
1	Pernyataan Risiko: ketidakefektifan Renstra Inspektorat dengan RPJMD Penyebab: Kurangnya koordinasi dengan BAPPELITBANGDA Kategori Risiko: Strategis Kode Risiko: RSO-21-1019-22	 DESI SNIORITA, S.Kom.	K = 4 D = 3 TR = 12 3 target	Diklat Substansi Kasubag Perencanaan	TW 2 dari 04 Apr 2022 s.d 08 Apr 2022	TW 3 s.d TW 4 dari 01 Jul 2022 s.d 30 Des 2022	Terlaksananya Diklat Substansi bagi kasubag perencanaan	K = 3 D = 2 TR = 6 3 target	Open Penanganan Tuntas Belum Selesai Penanganan



RISIKO FRAUD Risiko Fraud atau risiko kecurangan merujuk pada potensi penipuan atau tindakan curang yang dapat merugikan Pemerintah Daerah. Risiko ini melibatkan tindakan yang disengaja untuk memanipulasi informasi,

keuangan, atau sumber daya lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan Pemerintah Daerah.

Beberapa contoh risiko kecurangan yang dapat terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

4. Penggelapan Dana: Misalnya, pegawai yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana publik menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.
5. Manipulasi Laporan Keuangan: Perubahan atau penyajian informasi keuangan yang tidak akurat untuk menyembunyikan kegiatan yang merugikan.
 - Korupsi: Penerimaan atau pemberian suap, gratifikasi, atau insentif lainnya untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang menguntungkan pihak tertentu.
 - Penyalahgunaan Wewenang: Penggunaan kekuasaan atau kewenangan yang melebihi batasnya untuk keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain.

Mengidentifikasi, mencegah, dan mengendalikan Risiko Fraud adalah penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah. Langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan meliputi implementasi kontrol internal yang ketat, pelaksanaan kode etik dan perilaku, pelatihan bagi pegawai tentang tindakan fraud, serta melakukan audit secara teratur, seperti pada contoh dibawah ini:

11 Kategori Risiko - Risiko Fraud									
Menampilkan 10 Data									
No.	Pernyataan Risiko Resiko Kategori Risiko	Penyebab	Risiko Kategori Risiko	Indikator Kategori Risiko	Respon Kategori Risiko	Respon Kategori Risiko	Respon Kategori Risiko	Respon Kategori Risiko	Respon Kategori Risiko
1	Pernyataan Risiko: APF mungkin saja merobek/menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap. Penyebab: 1. Klematis pengendalian internal/penerapan SOP belum optimal 2. Adanya Ralat tidak baik dari oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi/ memperkaya diri sendiri dan atau kelompok/kelompok tertentu. Kategori Risiko: Man, Fraud, Penggelapan dalam Jabatan, Tindakan Kode Risiko: FRA-21-1217-22	 SU SANTIO, S.E., Ak. CA, N.M.	K = 2 D = 4 TR = 8 100%	Pernyataan Risiko: APF melalui bentuk sosialisasi/ antisipasi, adanya reward terhadap APF melalui kegiatan pengendalian.	TW 2 s.d TW 4 dari 01 Jun 2022 s.d 31 Des 2022	TW 2 s.d TW 4 dari 01 Jun 2022 s.d 31 Des 2022	1 laporan	K = 2 D = 3 TR = 6 100%	Status Pengendalian: Berhasil
1	Pernyataan Risiko: kemungkinan adanya manipulasi data pendukung anggaran Penyebab: lemahnya pengendalian internal dan adanya Ralat tidak baik dari oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi/ memperkaya diri sendiri dan atau kelompok/kelompok tertentu. Kategori Risiko: Man, Fraud, Penggelapan dalam Jabatan, Kesempatan Kode Risiko: FRA-21-1214-22	 SU SANTIO, S.E., Ak. CA, N.M.	K = 2 D = 3 TR = 6 100%	Melakukan peran GPI dalam proses perencanaan keuangan.	TW 2 s.d TW 4 dari 01 Jun 2022 s.d 31 Des 2022	TW 3 s.d TW 4 dari 01 Jul 2022 s.d 30 Des 2022	1 laporan	K = 1 D = 2 TR = 2 100%	Status Pengendalian: Berhasil



DAMPAK KATASTROFIK Dampak Katastrofik merujuk pada risiko-risiko yang memiliki potensi dampak yang sangat besar dan merusak jika terjadi. Risiko-risiko ini dapat memiliki konsekuensi yang luas dan serius, baik dalam hal

kerugian finansial, kerusakan fisik, maupun dampak sosial dan lingkungan.

Beberapa contoh risiko dengan Dampak Katastrofik meliputi:

- Bencana Alam: Seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran hutan, dan badai tropis yang dapat menyebabkan kerusakan luas dan korban jiwa.
- Krisis Kesehatan: Seperti pandemi penyakit menular, yang dapat mengakibatkan penyebaran yang cepat dan dampak yang luas terhadap kesehatan masyarakat.
- Krisis Keamanan: Seperti terorisme, perang, atau konflik bersenjata yang dapat menyebabkan kerusakan besar-besaran dan korban jiwa.
- Kegagalan Infrastruktur : Seperti kegagalan jaringan listrik, air bersih, atau komunikasi yang dapat mengganggu layanan penting dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Penting untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dengan Dampak Katastropik dengan serius. Langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang tepat harus diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko tersebut, serta mempersiapkan rencana tanggap darurat yang efektif untuk mengatasi dampak jika risiko tersebut terjadi. Dengan demikian, pemerintah dan organisasi dapat meminimalkan kerugian dan melindungi masyarakat dari risiko yang dapat merusak, seperti pada contoh dibawah ini:

1 Skala Dampak Risiko Sangat Tinggi (Katastropik)									
Menampilkan 10 Data									
No	Pernyataan Risiko Penyebab Kategori Kode Risiko	PIC	Risiko Inherent	Rencana Penanganan	Rencana Tanggap Pelaksanaan	Realisasi Tanggap Pelaksanaan	Indikator Output	Risiko Residu	Status Penanganan
1	Pernyataan Risiko: SKPD terlambat menandatangani LHP Penyebab: Pejabat di PD tidak memahami rekomendasi TL nya Kategori Risiko: Kapabilitas Kode Risiko: RSKN-21-1106-22	 YURISMANIRAH, S.T, S.M.	K = 3 D = 5 TR = 15 S - Sangat Tinggi	Mencaklasiikan pengesahan TLHP sesuai SKPD, sm pemersahan dilakikan dalam TL	TW 1 s.d TW 4 dari 03 Jan 2022 s.d 30 Des 2022	TW 3 s.d TW 4 dari 01 Jul 2022 s.d 30 Des 2022	Laporan Tidak Lengkap	K = 2 D = 3 TR = 6 3 - Rendah	

RISIKO MITRA Risiko Mitra adalah kategori risiko yang terkait dengan kerjasama atau kemitraan Pemerintah Daerah dengan pihak lain, baik itu mitra bisnis, organisasi non-profit, atau pihak lainnya. Risiko ini mencakup potensi dampak negatif yang timbul dari kerjasama atau kemitraan tersebut terhadap Pemerintah Daerah. Beberapa contoh risiko mitra meliputi:

- Kerugian Finansial: Risiko kerugian finansial akibat dari kerjasama yang tidak menguntungkan atau kegagalan mitra dalam memenuhi kewajibannya.
- Kerugian Reputasi: Risiko terhadap reputasi Pemerintah Daerah akibat dari tindakan atau kebijakan mitra yang kontroversial atau merugikan.
- Kegagalan Kinerja: Risiko terkait dengan kegagalan mitra dalam mencapai hasil atau kinerja yang diharapkan dalam kerangka kerjasama.
- Ketidapatuhan Hukum: Risiko terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mitra dalam konteks kerjasama, yang dapat merugikan Pemerintah Daerah secara legal dan finansial.
- Konflik Kepentingan: Risiko terkait dengan adanya konflik kepentingan antara Pemerintah Daerah dan mitra yang dapat mengganggu tujuan dan keberlanjutan kerjasama.

Untuk mengelola Risiko Mitra, penting untuk melakukan evaluasi risiko yang cermat sebelum memasuki kerjasama atau kemitraan, menyusun kontrak yang jelas dan tegas, serta memonitor dan mengevaluasi kinerja mitra secara teratur. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat meminimalkan risiko yang terkait dengan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lain dan memastikan bahwa tujuan kerjasama dapat tercapai dengan baik, seperti pada contoh dibawah ini:

1

Risiko Mitra Perangkat Daerah

TUTUP

CETAK TABEL

Menampilkan 10 Data

Cari:

No	Pernyataan Risiko Penyebab Kategori Kode Risiko	INC	Risiko Inherent	Strategi Penanganan	Responsa Tanggal Pelaksanaan	Responsa Tanggal Pelaksanaan	Indikator Output	Risiko Residu	Status Penanganan
	Pernyataan Risiko: Keterlambatan dalam penyelesaian proyek Penyebab: Hal ini dapat disebabkan oleh faktor seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya keahlian atau pengalaman, atau perubahan lingkungan yang tidak terduga Kategori Risiko: Mitra Kode Risiko: MTR-21-1379-22		K = 2 D = 4 TR = 8 Rendah	-	TW 3 s.d TW 4 dari 01 Sep 2023 s.d 29 Des 2023	Belum direalisasikan	-	Belum direalisasikan	100%  Risiko 100% Risiko Terkendali

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 Data

Sebelumnya

1

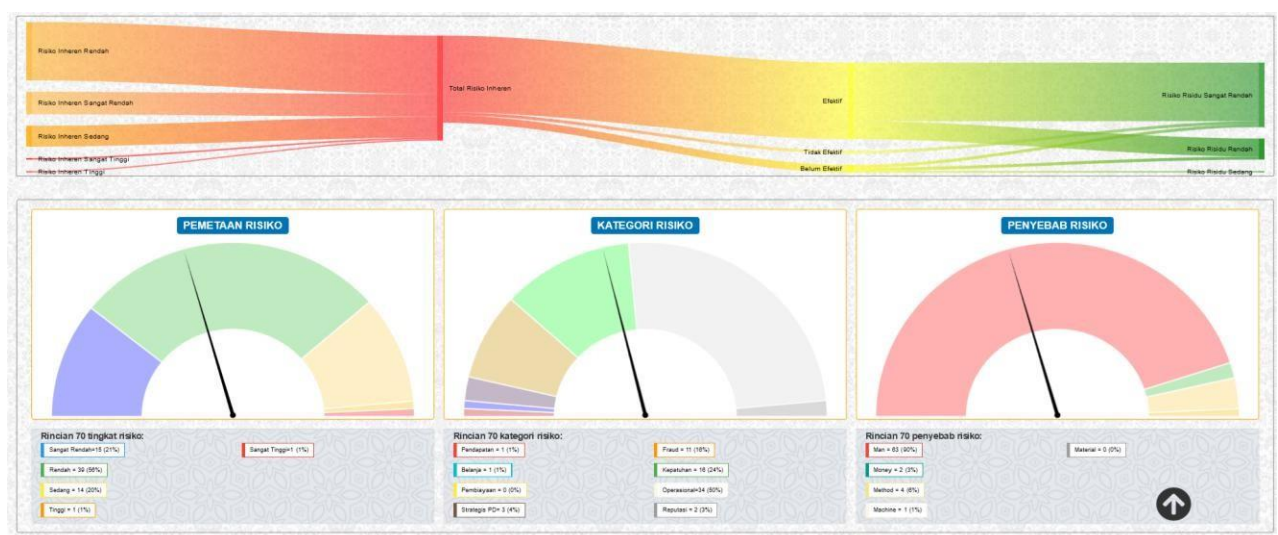
Selanjutnya

Dashboard memberikan gambaran yang komprehensif tentang jenis risiko yang sedang dihadapi dan dikelola oleh sistem ini. Hal ini memungkinkan pihak terkait untuk lebih fokus dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespons risiko-risiko yang ada guna mengoptimalkan pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Melalui informasi ini, para pengguna dashboard dapat lebih memahami distribusi dan karakteristik risiko-risiko yang ada, serta memprioritaskan upaya penanganan risiko sesuai dengan tingkat kepentingan dan dampaknya. Ini membantu dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam manajemen risiko Pemerintah Daerah.

Selain itu, tampilan kategori risiko juga dapat membantu dalam mengidentifikasi tren risiko yang mungkin berkembang dari waktu ke waktu. Dengan melacak perubahan dalam kategori risiko tertentu, pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah pencegahan atau penanganan yang sesuai untuk mengurangi risiko yang ada.

Dengan demikian, dashboard SI-MERI tidak hanya memberikan informasi tentang tingkat risiko secara umum, tetapi juga memberikan gambaran tentang jenis risiko apa yang sedang dihadapi dan bagaimana risiko-risiko ini dapat dikelola dengan lebih efektif. Hal ini memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan yang tepat guna melindungi kepentingan dan keberlangsungan operasionalnya.



Tingkat risiko mengacu pada penilaian terhadap kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang merugikan atau negatif serta dampak yang ditimbulkannya. Dalam konteks

manajemen risiko, tingkat risiko digunakan untuk mengukur tingkat keparahan atau kepentingan suatu risiko bagi suatu organisasi. Penilaian ini sering kali dilakukan dengan menggabungkan dua faktor utama, yaitu kemungkinan terjadinya risiko (likelihood) dan dampaknya (impact).

Kemungkinan terjadinya risiko mengukur seberapa mungkin suatu risiko akan terjadi dalam periode tertentu. Dampak, di sisi lain, mengukur seberapa besar konsekuensi negatif yang mungkin terjadi jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Dengan mengkombinasikan kedua faktor ini, organisasi dapat menentukan tingkat risiko secara lebih terperinci, seperti sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi.

Penilaian tingkat risiko ini penting karena membantu organisasi atau program/kegiatan dalam mengidentifikasi risiko yang paling penting atau mendesak untuk ditangani. Dengan mengetahui tingkat risiko dari berbagai risiko yang ada, manajemen risiko dapat menentukan prioritas tindakan penanganan risiko yang harus diambil untuk mengurangi risiko secara efektif dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian negara ≤ Rp10 Juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu periode
Minor (2)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d Rp50 Juta	Keluhan stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu periode
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu periode
Signifikan (4)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp100 Juta s.d Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu periode
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja ≤ 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode

LEVEL KEMUNGKINAN	JUMLAH FREKUENSI KEMUNGKINAN TERJADI DALAM 1 PERIODE	PROSENTASE KEMUNGKINAN TERJADI DALAM 1 PERIODE
Hampir Tidak Terjadi(1)	Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 periode
Jarang Terjadi (2)	Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari volume transaksi dalam 1 periode

LEVEL KEMUNGKINAN	JUMLAH FREKUENSI KEMUNGKINAN TERJADI DALAM 1 PERIODE	PROSENTASE KEMUNGKINAN TERJADI DALAM 1 PERIODE
Kadang Terjadi (3)	Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d 18 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d 20% dari volume transaksi dalam 1 periode
Sering Terjadi (4)	Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d 50% dari volume transaksi dalam 1 periode
Hampir Pasti Terjadi (5)	Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 periode

Tingkat risiko sangat rendah menunjukkan bahwa risiko tersebut memiliki kemungkinan terjadinya yang sangat kecil, dan jika terjadi, dampaknya juga rendah atau hampir tidak signifikan. Risiko ini umumnya dianggap dapat diterima tanpa perlu tindakan penanganan yang signifikan.

Risiko rendah menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya risiko tersebut masih cukup kecil, namun jika terjadi, dampaknya mungkin lebih besar daripada risiko sangat rendah. Meskipun demikian, risiko ini masih dianggap dapat dikelola dengan baik tanpa memerlukan tindakan yang terlalu berlebihan.

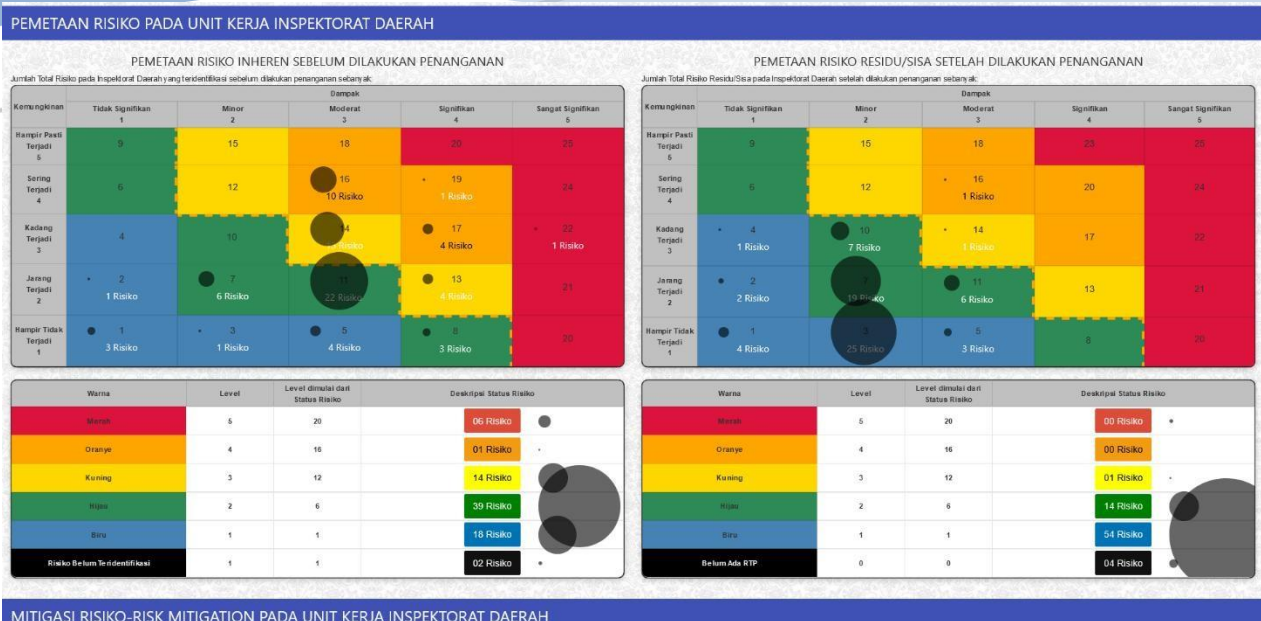
Risiko sedang menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya risiko tersebut sudah cukup signifikan, dan dampaknya juga bisa cukup besar. Risiko ini memerlukan perhatian lebih dan tindakan penanganan yang lebih serius untuk mengurangi kemungkinan terjadinya atau dampak yang ditimbulkannya.

Risiko tinggi menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya risiko tersebut sudah sangat besar, dan dampaknya juga sangat signifikan. Risiko ini memerlukan tindakan penanganan yang segera dan efektif untuk mengurangi risiko atau menghindari terjadinya.

Risiko sangat tinggi menunjukkan bahwa risiko tersebut hampir pasti akan terjadi, dan dampaknya akan sangat merugikan atau bahkan mengancam kelangsungan operasional suatu aktivitas atau proyek. Risiko ini memerlukan tindakan penanganan yang paling serius dan mendesak untuk mengurangi risiko atau menghindarinya sepenuhnya.

PEMETAAN RISIKO

Peta risiko 5 x 5 adalah alat visual yang digunakan dalam manajemen risiko untuk menggambarkan dan mengklasifikasikan risiko berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya jika risiko tersebut terjadi. Peta ini terdiri dari matriks 5 kolom dan 5 baris, yang masing-masing mewakili tingkat kemungkinan dan dampak risiko.



Pada sumbu horizontal, terdapat skala untuk tingkat kemungkinan risiko, yang dapat berupa sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Sedangkan pada sumbu vertikal, terdapat skala untuk dampak risiko, yang juga dapat berupa sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Dengan menggunakan peta risiko 5 x 5, setiap risiko dapat ditempatkan dalam salah satu dari 25 sel yang ada dalam matriks, yang masing-masing mewakili kombinasi tingkat kemungkinan dan dampak risiko tersebut. Misalnya, risiko dengan kemungkinan terjadinya rendah dan dampaknya tinggi akan ditempatkan pada sel yang sesuai di dalam matriks.

Peta risiko 5 x 5 adalah alat manajemen risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memprioritaskan risiko-risiko yang dihadapi oleh organisasi atau proyek. Peta ini memiliki dua dimensi, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya jika risiko tersebut terjadi. Dengan memetakan risiko-risiko pada matriks 5 x 5, organisasi atau proyek dapat dengan cepat melihat risiko mana yang paling penting untuk ditangani.

Peta risiko 5 x 5 biasanya memiliki lima tingkat untuk kemungkinan (dari rendah hingga sangat tinggi) dan lima tingkat untuk dampak (dari rendah hingga sangat tinggi). Risiko-risiko yang berada pada kategori tinggi atau sangat tinggi baik dari segi kemungkinan maupun dampaknya, seringkali dianggap sebagai risiko yang perlu mendapat perhatian lebih dalam pengelolaan risiko.

Dengan menggunakan peta risiko ini, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dapat membuat strategi yang lebih efektif dalam menghadapi risiko-risiko yang dihadapi. Langkah-langkah pengelolaan risiko seperti mitigasi, transfer, atau penerimaan risiko dapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan melalui peta risiko 5 x 5.

MITIGASI RISIKO

Mitigasi risiko adalah proses identifikasi, evaluasi, dan penerapan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang mungkin terjadi atau telah diidentifikasi. Tujuan dari mitigasi risiko adalah untuk mengurangi dampak negatif dari risiko tersebut atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

Penerapan langkah-langkah mitigasi risiko harus didasarkan pada analisis risiko yang cermat dan perencanaan yang matang. Dengan melakukan mitigasi risiko secara efektif, organisasi dapat mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan mereka.

Untuk penanganan risiko strategi pengendalian risiko pada Inspektorat Daerah, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:



- **Risiko Diterima:** Risiko-risiko ini hanya memerlukan pemantauan singkat, dan pengendalian normal sudah mencukupi. Namun, jika risiko-risiko ini tidak diperhatikan sama sekali, maka dapat meningkat statusnya atau prioritasnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan yang berkala dan evaluasi terhadap pengendalian yang sudah ada.



Penanganan risiko diterima melibatkan pemantauan rutin terhadap risiko yang diidentifikasi. Meskipun pengendalian normal dianggap cukup untuk mengelola risiko ini, tetap memperhatikan risiko tersebut agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Sebagai contoh, pada OPD Inspektorat Daerah, risiko diterima mungkin terkait dengan potensi pelanggaran terhadap peraturan atau kebijakan internal. Meskipun kebijakan dan prosedur internal sudah ada untuk mengendalikan risiko ini, tetapi risiko ini tetap

perlu dipantau secara berkala.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mitigasi risiko ini meliputi:

Pemantauan secara Berkala: Melakukan pemantauan secara teratur terhadap implementasi kebijakan dan prosedur internal untuk memastikan bahwa mereka diikuti dengan benar.

Pelatihan dan Awareness: Melakukan pelatihan dan meningkatkan kesadaran pegawai tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal.

Audit Internal: Melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal serta mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan.

Sanksi dan Tindakan Disiplin: Menetapkan sanksi dan tindakan disiplin yang tegas bagi mereka yang melanggar peraturan atau kebijakan internal sebagai bentuk deterrent.

Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Risiko: Menggunakan sistem informasi manajemen risiko untuk memantau risiko secara lebih efektif dan membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan mitigasi risiko.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Inspektorat Daerah dapat meminimalkan risiko pelanggaran terhadap peraturan atau kebijakan internal dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

15 Tingkat Risiko Sangat Rendah- Risiko di Terima											TUTUP
Menampilkan 10 Data											Cari:
No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Kategori	Kemungkinan	Dampak	Tingkat	Rencana Penanganan	Mulai	Selesai	PIC	Status
1	Tim pemeriksa gagal mengidentifikasi penyimpangan	Kompetensi auditor/pemeriksa kurang memadai	Man	2	2	4	peningkatan kapasitas sdm melalui diklat/FOD/Bimtek/Workshop/ PKS	2022-01-03	2022-12-30	YURISMANSYAH, S.T.M.M.	Open
2	LPPD Kabupaten dan Kota Terlambat Dikumpulkan oleh Satgas	LPPD tidak disampaikan oleh Kab/Kota	Man	2	2	4	Sosialisasi kepada Petugas Kabupaten dan Kota	2022-12-01	2022-12-09	IMAM KUSNADI, S.E., M.AB., C.FIA, CRGP	Close
3	Isian template belum memadai sesuai pedoman	Tenaga teknis pelaksanaan evaluasi belum ahli dalam evaluasi gunakan Template	Man	2	2	4	Risru Desain dengan melibatkan Tim Teknis	2022-11-21	2022-11-25	IMAM KUSNADI, S.E., M.AB., C.FIA, CRGP	Open
4	Penetapan jadwal evaluasi antar BPKP, Biro Pemerintahan dan Iptor tidak sama	Terbatasnya Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi	Man	2	2	4	Diklat Substantif untuk tim evaluator	2022-05-16	2022-05-20	IMAM KUSNADI, S.E., M.AB., C.FIA, CRGP	Open
5	Lemahnya perencanaan pelaksanaan Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	Penetapan ST Tim Terlambat dibagikan	Man	2	2	4	Risru Desain dengan melibatkan Tim Teknis	2022-12-12	2022-12-16	IMAM KUSNADI, S.E., M.AB., C.FIA, CRGP	Open
6	semungkinan adanya isap antapegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan	Adanya iklat tidak baik dari oknum tertentu untuk kepentingan pribadi dengan harapan proses kenaikan pangkat/polongan dapat berjalan dengan lancar	Man	2	2	4	Pembangunan integritas pada Tim Penilai Angka Kredit, penguatan SOP/aturan terkait Penilaian Angka Kredit Fungsional	2022-06-01	2022-12-31	SUSANTO, S.E., AK.CA., M.M.	Open
7	Penyusunan laporan pertanggungjawaban mungkin saja dengan built-built pengeluaran yang tidak benar	1. Kelemahan pengendalian internal/penetapan SOP belum optimal 2. Adanya iklat tidak baik dari oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi/ memperkaya diri sendiri dan atau kelompok/kelompok tertentu	Man	1	4	4	1. Audit sistem informasi pembayaran melalui transfer 2. Secara insidental Pimpin melakukan rekonsiliasi 3. Peningkatan kapasitas SPI untuk dapat melakukan Audit internal atas sistem informasi pembayaran 4. Meminimalisir penyimpanan kas dalam jumlah besar	2022-06-01	2022-12-31	SUSANTO, S.E., AK.CA., M.M.	Open
8	Penyedia mungkin saja memberikan gratifikasi kepada pejabat dan atau tim evaluasi pengadaan atas dimengukannya dalam proyek pembangunan	1. Kelemahan pengendalian internal/penetapan SOP belum optimal 2. Adanya iklat tidak baik dari oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi/ memperkaya diri sendiri dan atau kelompok/kelompok tertentu	Man	1	4	4	Peningkatan integritas APSP melalui bimtek/ sosialisasi antikorupsi, adanya reward terhadap APSP melalui tunjangan penghasilan	2022-06-01	2022-12-31	SUSANTO, S.E., AK.CA., M.M.	Open
9	kemungkinan adanya ikut serta dalam proses pengadaan langsung pada kegiatan pengadaan barang/jasa	1. Kelemahan pengendalian internal/penetapan SOP belum optimal 2. Adanya iklat tidak baik dari oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi/ memperkaya diri sendiri dan atau kelompok/kelompok tertentu 3. adanya ikatan tertentu antara user dengan penyedia	Man	1	4	4	memberikan pemahaman akan prinsip-prinsip, etika serta larangan dalam proses pengadaan, memberikan pemahaman akan tugas dan tanggung jawab masing-masing organisasi pengadaan, melapor kepada atasan	2022-06-01	2022-12-31	SUSANTO, S.E., AK.CA., M.M.	Open
10	Nilai RB tidak tercapai	Kurang optimalnya kinerja OPD	Man	1	3	3	Melakukan asistensi dan Melaksanakan Monitoring kepada OPD setiap triwulan	2022-03-07	2022-09-30	RACHA NURUL, S.P.M.T	Open

Menampilkan 1 sampai 10 dari 15 Data

Pemantauan rutin ini dapat dilakukan melalui audit internal yang berkala untuk memastikan bahwa proses pengendalian yang ada masih efektif. Evaluasi terhadap pengendalian yang sudah ada juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian tersebut tetap relevan dan mampu mengurangi risiko dengan baik.

Dalam penanganan risiko diterima, Inspektorat Daerah perlu memastikan bahwa ada

mekanisme yang jelas untuk melaporkan dan memantau risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Komunikasi yang efektif antara unit-unit kerja yang terlibat juga sangat penting untuk memastikan bahwa risiko diterima dapat dikelola dengan baik.

- **Tangani Risiko:** Risiko-risiko ini memerlukan prosedur rutin yang cukup untuk menanggung dampaknya. Diperlukan pengendalian intern yang efektif dan pemantauan yang berkelanjutan. Strategi penanganannya sebaiknya difokuskan pada pemantauan dan evaluasi terhadap prosedur pengendalian yang sudah ada.

Rendah

39

Limitation

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Strategi Pengendalian Risiko Rendah pada Inspektorat Daerah, sebagai berikut :

Tangani Risiko

Prosedur rutin yang cukup untuk menanggung dampak. Perlu pengendalian intern yang efektif dan pemantauan. Strategi yang fokus pada pemantauan & reviu prosedur pengendalian existing

Risiko yang memerlukan penanganan dengan pendekatan tangani risiko adalah risiko yang cukup signifikan sehingga memerlukan prosedur rutin untuk menanggung dampaknya. Misalnya, risiko terkait dengan kegagalan sistem keamanan informasi yang dapat menyebabkan kebocoran data sensitif.

Untuk mengatasi risiko ini, diperlukan pengendalian intern yang efektif, seperti implementasi kebijakan keamanan informasi yang ketat, penggunaan sistem keamanan yang mutakhir, dan pelatihan secara rutin bagi ASN.

Selain itu, pemantauan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah diimplementasikan masih efektif dalam mengurangi risiko. Misalnya, dengan melakukan audit keamanan informasi secara berkala dan memperbarui kebijakan keamanan jika diperlukan.

39

Tingkat Risiko Rendah - Risiko di Tangani

TUTUP

Menampilkan 10 Data

Cari:

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Kategori	Kemungkinan	Dampak	Tingkat	Rencana Penanganan	Mula	Selesai	PK	Status
1	Keterlambatan dalam pengumpulan dan pengolahan data Citra	kurangnya koordinasi inspektorat provinsi dengan inspektorat wilayah kabupaten/kota dalam hal penyampaian informasi kepada pihak yang menjadi objek pemeriksaan	Man	3	3	9	Inspektorat Provinsi melakukan koordinasi dengan inspektorat kabupaten/kota	2022-04-04	2022-04-22	RADEN JULIANTI NURDJANNAH, S.I.P.M.T	Selesai
2	Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) terlambat dikumpulkan oleh Tim Evaluator	OPD tidak menyampaikan laporan PMRB tepat waktu	Man	3	3	9	Diklat Substansi bagi pegawai yang melakukan penginputan data pendukung RB di Aplikasi PMRB	2022-03-08	2022-03-12	RADEN JULIANTI NURDJANNAH, S.I.P.M.T	Selesai
3	rekomendasi audit/pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti	Pembahasan hasil pemeriksaan tidak tuntas	Man	3	3	9	Pengawasan yang ketat dari penanggungjawab/bawahi penanggungjawab/dahis/keua tim ke anggota terhadap hasil temuan dan rekomendasi	2022-01-03	2022-12-30	YURISMANSYAH, S.T.M.M	Selesai
4	dokumen pendukung LHP tidak lengkap/ Hilang (KKP, expose, data dukung)	Arsip dokumen pendukung LHP diabaikan dan tidak terbit	Man	3	3	9	Penguatan SOP dalam proses pengumpulan data	2022-01-03	2022-12-30	YURISMANSYAH, S.T.M.M	Selesai
5	Keterbatasan SDM	Karena kurangnya pegawai pada bagian administrasi pada inspektorat	Man	3	3	9	Melaksanakan Koordinasi dengan BKPSKMD untuk menambah pegawai	2022-04-04	2022-04-25	DESI SINORITA, S.Kom.	Selesai
6	Rekomendasi audit/pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti	Pembahasan hasil pemeriksaan tidak tuntas	Man	3	3	9	Melakukan koordinasi secara rutin kepada OPD tentang hasil pemeriksaan	2022-03-28	2022-04-01	MM KUSNADI, S.E., M.AB.,CFA, CROP	Selesai
7	Tidak dibuat Daftar Penilaian Risiko	Pelugas / Satgas SPKP SKPD tidak kompeten dan profesional	Man	3	3	9	Intruksi Oubemur / Sekda kepada SKPD	2022-04-10	2022-04-22	MM KUSNADI, S.E., M.AB.,CFA, CROP	Selesai
8	Tidak dibuat laporan pelaksanaan SPKP oleh Satgas	Laporan tidak dibuat sesuai ketentuan	Man	3	3	9	SOP kegiatan audit mencakup perencanaan sampai dengan penyusunan Laporan dan KAK	2022-06-20	2022-06-24	MM KUSNADI, S.E., M.AB.,CFA, CROP	Selesai
9	Rekomendasi audit tidak dapat ditindaklanjuti	Pembahasan hasil audit tidak tuntas	Man	3	3	9	Peningkatan fungsi review oleh Ketua Tim, Dahis, Irtan, dan Pimpinan, terutama untuk temuan yang tidak dipaparkan	2022-04-01	2022-04-07	MM KUSNADI, S.E., M.AB.,CFA, CROP	Selesai
10	Isian template belum memadai sesuai pedoman	Tenaga teknis pelaksanaan evaluasi belum ahli dalam evaluasi gunakan Template	Man	3	3	9	Bimtek kepada Tim Evaluator	2022-01-03	2022-12-30	YURISMANSYAH, S.T.M.M	Selesai

Menampilkan 1 sampai 10 dan 39 Data

Sebelumnya

1

2

3

↑

Selanjutnya

Strategi penanganan risiko ini sebaiknya difokuskan pada pemantauan dan evaluasi terhadap prosedur pengendalian yang sudah ada. Hal ini dapat dilakukan dengan

melakukan review secara berkala terhadap kebijakan, prosedur, dan sistem yang ada untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam mengurangi risiko.

- **Risk Transference & Avoidance:** Risiko-risiko ini perlu dikelola dan direview secara rutin. Diperlukan pengendalian intern yang efektif dan pemantauan yang berkelanjutan. Strategi yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan probabilitas atau dampak dari risiko tersebut. Ini bisa dilakukan dengan cara mentransfer risiko ke pihak lain atau menghindari risiko tersebut sepenuhnya.

Sedang

14

Transference

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Strategi Pengendalian Risiko Sedang pada Inspektorat Daerah, sebagai berikut :

Transfer Risiko

Perlu dikelola dan direview secara rutin. Perlu pengendalian intern yang efektif dan pemantauan. Strategi harus dilaksanakan, turunkan probabilitas/dampaknya

Risiko yang perlu ditangani dengan pendekatan transfer risiko & avoidance adalah risiko-risiko yang memiliki dampak yang cukup signifikan dan sulit untuk dikelola secara internal. Misalnya, risiko terkait dengan perubahan regulasi yang dapat berdampak besar pada operasional organisasi.

15 Tingkat Risiko Sedang s.d Sangat Tinggi - Risiko di Transfer dan Avoidance
TUTUP X

Menampilkan 10 Data Cari:

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Kategori	Kemungkinan	Dampak	Tingkat	Rencana Penanganan	Mulai	Selesai	PIC	Keterangan
1	Kelengkapan Laporan Keuangan pada SIMDA dan SIPD	Aplikasi SIMDA dan SIPD tidak terintegrasi	Machine	4	4	16	Melakukan Koordinasi dengan BAKUDA dan BAPPELITBANGDA	2022-02-01	2022-02-28	DESI SINORITA, S.Kom	Risiko Tinggi 4 - Risiko Sedang
2	Tertambatnya Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	Data yang disampaikan oleh obyek pemeriksaan tertambat	Man	4	3	12	Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dan obyek yang menjadi objek pemeriksaan agar penyelesaian laporan hasil pemeriksaan tepat waktu	2022-02-01	2022-02-11	RADEN JULIANTI NURDJANNAH, S.P.M.T	Risiko Tinggi 4 - Risiko Sedang Risiko di Transfer
3	Tertambatnya Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	Kurangnya koordinasi inspektorat provinsi dengan obyek yang menjadi objek pemeriksaan	Man	4	3	12	Perlu adanya koordinasi dengan inspektorat kabupaten/kota dalam rapat koordinasi pengawasan daerah	2022-02-07	2022-02-22	DODY ROSMANSYAH, SE., M.SE	Risiko Tinggi 4 - Risiko Sedang Risiko di Transfer
4	Laporan Hasil Revisi Tertambat disampaikan	Keterlambatan dalam pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh OPD	Man	4	3	12	Diklat Substantif tentang Pembuatan Laporan Keuangan bagi Kasubdag Keuangan dan Auditor	2022-03-01	2022-03-05	DODY ROSMANSYAH, SE., M.SE	Risiko Tinggi 4 - Risiko Sedang Risiko di Transfer
5	TPTGR tidak dapat dilekaskan secara optimal	lemahnya SPIP dan kesadaran pihak terutang dalam memendaklakti TPTGR tersebut	Man	3	4	12	pengaturan aturan seperti Juklak Penyelesaian TPTGR dan penegakan sanksi sesuai aturan yang berlaku	2022-01-03	2022-12-30	YURISMANSYAH, S.T.M.M	Risiko Tinggi 4 - Risiko Sedang Risiko di Transfer
6	Rekomendasi audit tidak dapat dilekaskan	Rekomendasi terkait dengan pihak ketiga yang tidak bersedia memendaklakti temuan	Man	3	4	12	Penekanan tanggung jawab terhadap SKPD terkait temuan	2022-01-03	2022-12-30	YURISMANSYAH, S.T.M.M	Risiko Tinggi 4 - Risiko Sedang Risiko di Transfer
7	Keterlambatan dalam membuat rancangan Surat Keputusan Gubernur tentang PKPT	Tertambatnya data obyek OPD ditunggu pemerintah provinsi Babel dan data obyek yang akan di periksa pada kabupaten/kota dari inspektorat kabupaten/kota	Man	4	3	12	Melakukan koordinasi ke OPD dan Inspektorat kabupaten/kota secara rutin	2022-02-01	2022-01-07	IMAM KUSNADI, S.E., MAB, CFIA, CRGP	Risiko Tinggi 4 - Risiko Sedang Risiko di Transfer
8	Keterlambatan penyampaian data pendukung dari kabupaten/kota	pengumpulan data dari OPD di Kabupaten/Kota kepada Bagian Pemerintahan tertambat	Man	4	3	12	Melakukan koordinasi dengan bagian pemerintahan Kabupaten/Kota secara rutin untuk mendapatkan data pendukung agar Tim Evaluator dapat menginput data pada Aplikasi EKSPD	2022-09-01	2022-09-09	IMAM KUSNADI, S.E., MAB, CFIA, CRGP	Risiko Tinggi 4 - Risiko Sedang Risiko di Transfer
9	Pelaksanaan dan penerbitan LHP tidak tepat waktu	Jumlah Pemeriksaan/auditor kurang memadai dan perangkapan tugas	Man	4	3	12	Menambah jumlah auditor dalam tugas pengawasan agar tidak ada lagi perangkapan tugas	2022-03-14	2022-03-18	IMAM KUSNADI, S.E., MAB, CFIA, CRGP	Risiko Tinggi 4 - Risiko Sedang Risiko di Transfer
10	Laporan LAKIP Pemda tertambat disampaikan	Tidak disampaikan Tepat waktu	Man	4	3	12	Berkomunikasi dan melakukan koordinasi secara Aktif dengan Tim Penyusun LAKIP Pemda	2022-12-26	2022-12-30	IMAM KUSNADI, S.E., MAB, CFIA, CRGP	Risiko Tinggi 4 - Risiko Sedang Risiko di Transfer

Menampilkan 1 sampai 10 dari 15 Data

Untuk mengelola risiko ini, perlu dilakukan review rutin terhadap risiko-risiko yang diidentifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam evaluasi risiko dan identifikasi strategi pengelolaan yang tepat.

Pengendalian intern yang efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa strategi pengelolaan risiko dapat dilaksanakan dengan baik. Misalnya, dengan melibatkan berbagai departemen dalam proses pengambilan keputusan terkait risiko.

Strategi yang harus dilakukan dalam penanganan risiko ini adalah dengan menurunkan probabilitas atau dampak dari risiko tersebut. Ini bisa dilakukan dengan cara mentransfer risiko ke pihak lain atau menghindari risiko tersebut sepenuhnya. Misalnya,

dengan membeli asuransi untuk risiko yang dapat ditransfer atau dengan mengubah strategi bisnis untuk menghindari risiko yang tidak dapat diterima.

Pemantauan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa strategi pengelolaan risiko yang telah diimplementasikan efektif dalam mengurangi risiko. Evaluasi terhadap strategi pengelolaan risiko juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam mengurangi risiko yang dihadapi.

Semua strategi pengendalian risiko di atas, penting untuk melakukan pemantauan yang berkelanjutan dan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian yang dilakukan. Inspektorat Daerah perlu terus memperbaiki dan meningkatkan sistem pengendalian risiko untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang dihadapi dapat dikelola dengan baik dan tidak membahayakan pencapaian tujuan organisasi.

PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

Untuk melakukan input data Komitmen Manajemen Risiko (MR), terutama terkait dengan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan/atau Renstra, berikut adalah beberapa data yang perlu disiapkan:

1. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK): Dokumen ini berisi komitmen atau target kinerja yang harus dicapai oleh suatu unit atau individu dalam organisasi. Data yang perlu disiapkan dari PK antara lain:
 - Rincian target kinerja yang harus dicapai.
 - Waktu pencapaian target kinerja.
 - Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian target.
 - Risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian target kinerja.
2. Renstra (Rencana Strategis): Renstra adalah dokumen yang berisi visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi dalam jangka waktu tertentu. Data yang perlu disiapkan dari Renstra antara lain:
 - Visi, misi, dan tujuan organisasi.
 - Strategi-strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
 - Indikator kinerja atau parameter keberhasilan yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan.
3. Komitmen Manajemen Risiko (MR): Komitmen MR adalah komitmen dari pimpinan atau manajemen organisasi untuk mengelola risiko yang terkait dengan pencapaian target kinerja atau tujuan organisasi. Data yang perlu disiapkan dari komitmen MR antara lain:
 - Komitmen manajemen untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko.
 - Rencana tindak lanjut atau mitigasi risiko yang akan dilakukan.
 - Tanggal atau waktu pelaksanaan rencana mitigasi risiko.

Dengan mempersiapkan data-data ini, organisasi dapat melakukan input data Komitmen Manajemen Risiko dengan lebih terstruktur dan memastikan bahwa semua komitmen yang diperlukan telah dipertimbangkan dan direncanakan dengan baik. Input data Penetapan Konteks Manajemen Risiko, pada aplikasi SI-MERI, terbagi kedalam 6 (enam) bagian, yaitu:

1. **Unit Kerja/Bidang:** Unit Kerja atau Bidang adalah bagian dari suatu organisasi yang memiliki tanggung jawab dan tugas tertentu dalam mencapai tujuan organisasi. Unit kerja ini dapat terdiri dari berbagai bagian atau divisi yang memiliki fokus kerja yang spesifik, seperti Bagian Keuangan, Bagian Sumber Daya Manusia, atau Bagian Operasional.
2. **Organisasi Perangkat Daerah:** Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah unit-unit organisasi yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Contohnya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Penghubung.
3. **Sasaran:** Sasaran adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu unit kerja atau organisasi. Sasaran biasanya bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Sasaran dapat berupa pencapaian kinerja, perbaikan proses, atau peningkatan layanan.
4. **Indikator Unit Kerja:** Indikator Unit Kerja adalah parameter atau ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja atau pencapaian tujuan suatu unit kerja. Indikator ini membantu dalam mengukur sejauh mana unit kerja telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
5. **Daftar Pemangku Kepentingan (Stakeholders):** Daftar Pemangku Kepentingan adalah daftar orang, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dampak terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu proyek atau program. Pemangku kepentingan dapat berupa pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, atau pihak lain yang terkait.
6. **Peraturan terkait dengan TUPOKSI:** Peraturan terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) adalah peraturan yang mengatur tugas dan tanggung jawab suatu unit kerja atau organisasi. Peraturan ini biasanya merinci tanggung jawab, wewenang, dan tata kerja suatu unit kerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Tujuan Pelaksanaan MR, Peta Risiko dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan UPR, secara otomatis, disusun oleh sistem; berdasarkan isian data: Sasaran Program/Kegiatan, Daftar Pemangku Kepentingan dan Profil Risiko. Untuk Jadwal Pelaksanaan Kegiatan UPR meskipun otomatis digenerate oleh sistem tetapi masih dapat dilakukan perubahan (updating).

Untuk memulai Penetapan Konteks Manajemen Risiko, langkah-langkahnya adalah:

**SI-MERI**
SISTEM INFORMASI
MONITORING MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

**BerAKHLAK**
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**bangga**
melayani
bangsa

DASHBOARD ORGANISASI PROSES BISNIS MANAJEMEN RISIKO LAPORAN TENTANG APLIKASI IMAM KUSNADI, S.E., M.AB.,CFRA, CRGP  LOGOUT

PENETAPAN KONTEKS
RISIKO

PEGAWAI



SUMATERA SELATAN
BERSATU TEGUH



IMAM KUSNADI, S.E.,
M.AB.,CFRA, CRGP
197506092008121001

Jabatan
Inspektur Pembantu Bidang
Pembangunan, Sosial, Ekonomi
dan Budaya

Unit Kerja
Inspektorat Daerah

Organisasi
Inspektorat Daerah

Ganti Foto

Ganti Password

PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO INSPEKTORAT DAERAH

Unit Kerja/BidangInspektorat Daerah

OrganisasiInspektorat Daerah

Perangkat Daerah

Sasaran



1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Edit Sasaran

Indikator Unit Kerja



1. Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan di Bawah 5%
2. Persentase Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan
3. Level Capaian Maturitas SPIP
4. Nilai Hasil Kapabilitas APIP
5. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah

Edit IKU

Daftar Pemangku Kepentingan (Stakeholders)



1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Badan Pemeriksa Keuangan
6. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Edit Stakeholder

Peraturan terkait dengan TUPOKSI



1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Edit Tupoksi

Berikut adalah langkah-langkah input data Penetapan Konteks Manajemen Risiko pada aplikasi SI-MERI, terbagi ke dalam 6 bagian:

1. Sasaran:

- Pada menu Organisasi pilih ke sub menu "Penetapan Konteks"
- Pilih opsi untuk **Edit Sasaran**
- Masukkan informasi Sasaran, seperti nama sasaran, deskripsi singkat, target pencapaian, dan informasi lain yang diperlukan.

Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Simpan **Batal**

- Simpan data

2. Indikator Unit Kerja:

- Pada menu Organisasi pilih ke sub menu "Penetapan Konteks"
- Pilih opsi untuk **Edit IKU**
- Masukkan informasi Indikator Unit Kerja, seperti nama indikator, deskripsi singkat, target pencapaian, dan informasi lain yang diperlukan.

Indikator Unit Kerja

1. Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan di Bawah 5%

2. Persentase Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan

3. Level Capaian Maturitas SPIP

4. Nilai Hasil Kapabilitas APIP

5. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah

Simpan **Batal**

- Simpan data

3. Daftar Pemangku Kepentingan (Stakeholders):

- Pada menu Organisasi pilih ke sub menu "Penetapan Konteks"
- Pilih opsi untuk [Edit Stakeholder](#)
- Masukkan informasi Pemangku Kepentingan, seperti nama, peran, kepentingan, dan informasi lain yang diperlukan.

Daftar Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Badan Pemeriksa Keuangan
6. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Simpan data

[Simpan](#)

[Batal](#)

4. Peraturan terkait dengan TUPOKSI:

- Pada menu Organisasi pilih ke sub menu "Penetapan Konteks"
- Pilih opsi untuk [Edit Tupoksi](#)
- Masukkan informasi Peraturan terkait dengan TUPOKSI, seperti nomor peraturan, tanggal berlaku, deskripsi singkat, dan informasi lain yang diperlukan.

Peraturan terkait dengan TUPOKSI

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Simpan data

[Simpan](#)

[Batal](#)

PROSESBISNIS



SI-MERI
MONITORING MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI




DASHBOARD ORGANISASI PROSES BISNIS MANAJEMEN RISIKO LAPORAN TENTANG APLIKASI
MAM KUSNADI, S.E., M.AB., CFRA, CRGP 

PERJANJIAN KINERJA/INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SASARAN KERJA PECAH/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

PROSES BISNIS




PERJANJIAN KINERJA/INDIKATOR KINERJA PROGRAM INSPEKTORAT DAERAH

No	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran	Tahun	Aksi
1	Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkuatitas (INDEKS REFORMASI BROKRASI)	100%	0,00	2021	Edit Hapus
2	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	100%	0,00	2021	Edit Hapus
3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100%	0,00	2021	Edit Hapus
4	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100%	0,00	2021	Edit Hapus
5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	100%	0,00	2021	Edit Hapus
6	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	0,00	2021	Edit Hapus
7	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100%	0,00	2021	Edit Hapus
8	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	100%	0,00	2021	Edit Hapus
9	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	0,00	2021	Edit Hapus
10	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	0,00	2021	Edit Hapus
11	Risiko Fraud (FRA) Inspektorat	10 risiko	0,00	2022	Edit Hapus
12	Risiko MITRA Inspektorat	-	0,00	2023	Edit Hapus

DASHBOARD ORGANISASI PROSES BISNIS MANAJEMEN RISIKO LAPORAN TENTANG APLIKASI
MAM KUSNADI, S.E., M.AB., CFRA, CRGP 

PERJANJIAN KINERJA/INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SASARAN KERJA PECAH/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

PROSES BISNIS




IMAM KUSNADI, S.E., M.AB., CFRA, CRGP
19750002008121001

Jabatan
Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya

Unit Kerja
Inspektorat Daerah

Organisasi
Inspektorat Daerah

Tambah Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran	Tahun	Aksi
				Tambah

[Simpan](#) [Batal](#)

Proses Bisnis adalah serangkaian langkah atau tahapan yang dilalui dalam menjalankan suatu aktivitas atau tugas. Proses bisnis mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan dari awal hingga akhir dalam mencapai tujuan tertentu. Proses bisnis ini dapat dianalisis dan ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Indikator Kinerja Program adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dari suatu program. Setiap indikator kinerja program biasanya memiliki target pencapaian, anggaran yang dialokasikan, tahun pelaksanaan, dan aksi yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing komponen

Indikator Kinerja Program: Merupakan ukuran konkret yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan suatu program. Contohnya, jumlah pelatihan yang diselenggarakan, persentase peningkatan kesadaran masyarakat, atau jumlah unit produk yang diproduksi.

Target: Merupakan tingkat pencapaian yang diharapkan untuk indikator kinerja program dalam periode tertentu. Target biasanya dinyatakan dalam angka atau persentase. Misalnya, meningkatkan jumlah peserta pelatihan sebesar 20% dari tahun sebelumnya.

Anggaran: Merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mencapai target pencapaian indikator kinerja program. Anggaran ini mencakup semua biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan program, seperti biaya operasional, biaya personel, dan lain sebagainya.

Tahun: Merupakan periode waktu atau tahun pelaksanaan program dimana indikator kinerja program diukur. Biasanya, indikator kinerja program memiliki target pencapaian untuk setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja Program adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara atasan dan bawahan mengenai target kinerja yang harus dicapai oleh suatu program atau proyek. Dokumen ini mencakup tujuan, target, indikator kinerja, serta waktu yang telah disepakati untuk mencapai hasil yang diharapkan. Perjanjian kinerja ini penting sebagai acuan dalam menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja suatu program atau proyek.

PERJANJIAN KINERJA/
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM

SASARAN KERJA
PEGAWAI/INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN

PROSES BISNIS



IMAM KUSNADI, S.E.,
M.AB.,CFRA, CRGP
197506092008121001

Jabatan
Inspektur Pembantu Bidang
Pembangunan, Sosial, Ekonomi
dan Budaya

Unit Kerja
Inspektorat Daerah

Organisasi
Inspektorat Daerah

SASARAN KINERJA PEGAWAI - INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH

Tambah

No	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Volume	Mutu	Waktu	Biaya	Aksi
1	Memujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BIROKRASI)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	85%	6 Bulan	0,00	Edit SKP Hapus PK
		Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota yang berada di Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 Laporan	85%	6 bulan	0,00	Edit SKP Hapus PK
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang berada di Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	35 Laporan	90%	6 bulan	0,00	Edit SKP Hapus PK
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang berada di Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan	85%	6 Bulan	0,00	Edit SKP Hapus PK
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang berada di Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	8 LHP	85%	6 bulan	0,00	Edit SKP Hapus PK
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang berada di Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11 LHP	85%	6 bulan	0,00	Edit SKP Hapus PK
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	85%	6 bulan	0,00	Edit SKP Hapus PK
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang berada di Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi	6 Laporan	85%	6 bulan	0,00	Edit SKP Hapus PK
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Dokumen	85	2021	0,00	Edit SKP Hapus PK
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang berada di Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi	2 Laporan	85 %	2021	0,00	Edit SKP Hapus PK
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Laporan	100%	6 bulan	0,00	Edit SKP Hapus PK
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang berada di Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Budaya	6 Laporan	100%	6 bulan	0,00	Edit SKP Hapus PK
3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yang berada di Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Budaya	2 Laporan	85%	6 bulan	0,00	Edit SKP Hapus PK
4	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Menyusun Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan pada Irtan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	1 Laporan	100%	6 bulan	0,00	Edit SKP Hapus PK
5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1 LHP	100%	2 bulan	0,00	Edit SKP Hapus PK

Indikator Kinerja Program adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dari suatu program. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dari suatu kegiatan yang merupakan bagian dari program tersebut. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing komponen indikator kinerja program:

Indikator Kinerja Program: Merupakan ukuran konkret yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan suatu program. Contohnya, jumlah pelatihan yang diselenggarakan, persentase peningkatan kesadaran masyarakat, atau jumlah unit produk yang diproduksi.

Indikator Kinerja Kegiatan: Merupakan ukuran konkret yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan suatu kegiatan yang merupakan bagian dari program. Contohnya, jumlah peserta pelatihan, tingkat kepuasan peserta pelatihan, atau jumlah produk yang diproduksi dalam suatu kegiatan.

Volume: Merupakan jumlah atau kapasitas dari output atau outcome yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau program. Contohnya, jumlah barang yang diproduksi, jumlah layanan yang disediakan, atau jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.

Mutu: Merupakan tingkat kualitas dari output atau outcome yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau program. Mutu dapat diukur berdasarkan standar kualitas yang telah ditetapkan atau berdasarkan tingkat kepuasan pengguna atau pelanggan.

Waktu: Merupakan waktu yang diperlukan untuk mencapai output atau outcome yang diinginkan dari suatu kegiatan atau program. Waktu dapat diukur dalam satuan waktu tertentu, seperti bulan, tahun, atau periode lainnya.

Biaya: Merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program. Biaya dapat meliputi biaya operasional, biaya personel, biaya material, dan biaya lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan atau program tersebut.

Sasaran Kerja Pegawai/Indikator Kinerja adalah target pencapaian yang harus dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Sasaran kerja ini mencakup berbagai aspek, seperti kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dalam menjalankan tugasnya. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur sejauh mana pegawai telah mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran. Kegiatan ini merupakan langkah konkret yang harus dilakukan untuk mencapai hasil

serta sumber daya yang diperlukan.

Manajemen risiko pada pemerintah daerah mengacu pada proses yang sistematis, terstruktur, dan terkoordinasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan mereka.

Beberapa konsep utama dalam manajemen risiko pada pemerintah daerah meliputi:

1. **Konteks Organisasi:** Pemerintah daerah perlu memahami konteksnya, termasuk tujuan, sasaran, lingkungan, dan kerangka kerja yang mengatur operasinya, untuk mengidentifikasi risiko yang relevan.
2. **Komunikasi dan Konsultasi:** Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan terkait risiko, termasuk masyarakat, dalam proses manajemen risiko untuk memastikan persepsi yang tepat tentang risiko yang dihadapi.
3. **Proses Evaluasi Risiko:** Pemerintah daerah perlu menggunakan pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk mengevaluasi risiko, termasuk mengidentifikasi sumber risiko, menganalisis risiko, dan menilai konsekuensi risiko.
4. **Pengelolaan Risiko:** Setelah risiko diidentifikasi dan dievaluasi, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang efektif, termasuk mengurangi risiko, mentransfer risiko, menerima risiko, atau menghindari risiko.
5. **Pemantauan dan Tinjauan:** Manajemen risiko harus menjadi bagian dari proses yang berkelanjutan, dengan pemantauan dan tinjauan terus-menerus terhadap efektivitas strategi pengelolaan risiko dan penyesuaian jika diperlukan.

Manajemen risiko membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka, sehingga mendukung pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan mengelola sumber daya mereka dengan lebih efektif.

Profil Risiko merupakan bagian inti dari penyusunan Komitmen Manajemen Risiko. Isian data Profil Risiko dengan jumlah yang banyak dapat dikelompokkan berdasarkan tahapan proses Manajemen Risiko, yaitu:

- **Identifikasi Risiko.**

Identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menggambarkan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi, proyek, atau kegiatan. Proses ini melibatkan mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang mungkin timbul, seperti risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi, risiko teknologi, dan lain-lain. Identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam manajemen risiko yang penting untuk menentukan strategi pengelolaan risiko yang tepat.

Langkah-langkah dalam identifikasi risiko meliputi:

- **Pengumpulan Informasi:** Mengumpulkan informasi yang relevan tentang aktivitas, proses, atau lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi terjadinya risiko.
- **Identifikasi Risiko Potensial:** Mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Risiko-risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti lingkungan eksternal, perubahan kebijakan, atau kesalahan manusia.
- **Analisis Risiko:** Menganalisis risiko-risiko yang telah diidentifikasi untuk memahami sumber, penyebab, dan potensi dampaknya terhadap organisasi atau proyek.
- **Penilaian Risiko:** Menilai tingkat risiko dari setiap risiko yang diidentifikasi berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya jika terjadi.
- **Prioritisasi Risiko:** Mengurutkan risiko-risiko berdasarkan tingkat prioritasnya, sehingga risiko-risiko yang memiliki dampak dan kemungkinan terjadinya yang tinggi dapat ditangani lebih awal.
- **Dokumentasi Risiko:** Mendokumentasikan semua risiko yang telah diidentifikasi beserta informasi terkait, seperti sumber risiko, faktor penyebab, dan tingkat prioritasnya.

Identifikasi risiko merupakan langkah yang kritis dalam manajemen risiko yang memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka, sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengelola risiko tersebut, untuk input Identifikasi Risiko masuk ke menu

Setelah itu klik sub menu **Identifikasi Risiko**

Akan muncul layar sebagai berikut:

IDENTIFIKASI RISIKO
DAFTAR RISIKO
RENCANA PENANGANAN RISIKO
REALISASI PENANGANAN RISIKO
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP



SI-MERI
SISTEM INFORMASI
MONITORING MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI



berAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



DASHBOARDORGANISASIPROSES BISNISMANAJEMEN RISIKOLAPORANTENTANG APLIKASIMAM KUSNADI, S.E., M.AB.,CFRA, CRGPPLOGOUT

IDENTIFIKASI RISIKO

DAFTAR RISIKO

RENCANA PENANGANAN RISIKO

REALISASI PENANGANAN RISIKO

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP





IMAM KUSNADI, S.E.,
M.AB.,CFRA, CRGP
197506092008121001

Jabatan
Inspektur Pembantu Bidang
Pembangunan, Sosial, Ekonomi
dan Budaya

Unit Kerja
Inspektorat Daerah

Organisasi
Inspektorat Daerah

IDENTIFIKASI RISIKO PADA PD INSPEKTORAT DAERAH

adalah proses penentuan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja perangkat daerah dan pendokumentasian karakteristiknya. Mengidentifikasi risiko (Identify Risk) merupakan proses yang berulang, karena risiko baru dapat berkembang atau diketahui saat pelaksanaan program dan kegiatan berjalan melalui siklus hidupnya sebagai hasil perubahan internal atau eksternal terhadap pencapaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam konteks organisasi, Inspektorat Daerah sebagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menghadapi banyak risiko. Jika Inspektorat Daerah tidak bisa mengelola risiko dengan baik, maka Inspektorat Daerah bisa mengalami kerugian. Karena itu risiko yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah harus dikelola, agar Inspektorat Daerah bisa bertahan atau berangsur mengoptimalkan risiko, untuk melihat kriteria dampak, kemungkinan, dan kategori risiko terkait dengan pengelolaan manajemen risiko Inspektorat Daerah silahkan klik menu bar dibawah ini:

Kriteria Dampak	Skala Kemungkinan	Kategori Risiko
Level Dampak	Area Dampak	
	Kerugian Negara	Penurunan reputasi
Tinggi (Signifikan) (1)	Jumlah kerugian negara ≤ Rp10 Juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/ tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 dalam satu periode
Tinggi (Signifikan) (2)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d Rp50 Juta	Keluhan stakeholder secara langsung lisan/ tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal
Signifikan (4)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp100 Juta s.d Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional
Kategori Dampak (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional

No	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Proses Bisnis	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Sisa Risiko	Aksi
1	Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BIROKRASI)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) dari Perangkat Daerah	Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) terlambat dikumpulkan oleh Tim Evaluator	3	3	2 - Rendah	Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) terlambat dikumpulkan oleh Tim Evaluator	Edit Risiko
		Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) OPD	Nilai RB tidak tercapai		1	3	1 - Sangat Rendah	keterlambatan dalam penginputan data RB oleh Admin OPD pada Aplikasi PMRB	Edit Risiko
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota yang	Pengumpulan oblik dan pengolahan data pemeriks aan dari	Keterlambatan dalam pengumpulan dan pengolahan data		3	3	2 - Rendah	masih terlambatnya pengumpulan dan pengolahan data	Edit Risiko

Pada tampilan diatas klik [Identifikasi Risiko](#) untuk identifikasi risiko, atau [Edit Risiko](#) untuk edit risiko yang sudah dilakukan identifikasi

Setelah itu isikan data-data dimasing-masing kolom sebagai berikut:

Proses Bisnis: Serangkaian langkah atau tahapan yang dilalui dalam menjalankan suatu aktivitas atau tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Proses bisnis mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan dari awal hingga akhir dalam mencapai tujuan tersebut.

Proses Bisnis	Risiko	Skenario Terjadi Risiko	Kemungkinan	Dampak																							
Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) dari Perangkat Daerah	Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) terlambat dikumpulkan oleh Tim Evaluator	Jelaskan skenario terjadi risiko body	3 - Kadang-kadang	3 - Sedang																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian Dampak</th> <th>Kategori Risiko</th> <th>Kategori Risiko Fraud</th> <th>Penyebab</th> <th>Faktor Penyebab</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uraian Dampak body</td> <td>Operasional</td> <td>--Pilih Kategori Fraud--</td> <td>OPD tidak menyampaikan laporan PMRB tepat waktu body</td> <td>Man</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori Penyebab Risiko Fraud</th> <th>Pengendalian</th> <th>Sisa Risiko</th> <th>Rekomendasi Evaluator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>--Penyebab Risiko Fraud--</td> <td>Tim Evaluator memberikan sosialisasi kepada OPD untuk pemenuhan data pendukung PMRB body</td> <td>Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) terlambat dikumpulkan oleh Tim Evaluator body</td> <td> Nilai kemungkinan, Dampak, Tingkat Risiko Residual 0, sebaiknya untuk nilai tersebut jika belum ada penanganan maka disamakan dengan Nilai kemungkinan. </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>					Uraian Dampak	Kategori Risiko	Kategori Risiko Fraud	Penyebab	Faktor Penyebab	Uraian Dampak body	Operasional	--Pilih Kategori Fraud--	OPD tidak menyampaikan laporan PMRB tepat waktu body	Man	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori Penyebab Risiko Fraud</th> <th>Pengendalian</th> <th>Sisa Risiko</th> <th>Rekomendasi Evaluator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>--Penyebab Risiko Fraud--</td> <td>Tim Evaluator memberikan sosialisasi kepada OPD untuk pemenuhan data pendukung PMRB body</td> <td>Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) terlambat dikumpulkan oleh Tim Evaluator body</td> <td> Nilai kemungkinan, Dampak, Tingkat Risiko Residual 0, sebaiknya untuk nilai tersebut jika belum ada penanganan maka disamakan dengan Nilai kemungkinan. </td> </tr> </tbody> </table>					Kategori Penyebab Risiko Fraud	Pengendalian	Sisa Risiko	Rekomendasi Evaluator	--Penyebab Risiko Fraud--	Tim Evaluator memberikan sosialisasi kepada OPD untuk pemenuhan data pendukung PMRB body	Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) terlambat dikumpulkan oleh Tim Evaluator body	Nilai kemungkinan, Dampak, Tingkat Risiko Residual 0, sebaiknya untuk nilai tersebut jika belum ada penanganan maka disamakan dengan Nilai kemungkinan.
Uraian Dampak	Kategori Risiko	Kategori Risiko Fraud	Penyebab	Faktor Penyebab																							
Uraian Dampak body	Operasional	--Pilih Kategori Fraud--	OPD tidak menyampaikan laporan PMRB tepat waktu body	Man																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori Penyebab Risiko Fraud</th> <th>Pengendalian</th> <th>Sisa Risiko</th> <th>Rekomendasi Evaluator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>--Penyebab Risiko Fraud--</td> <td>Tim Evaluator memberikan sosialisasi kepada OPD untuk pemenuhan data pendukung PMRB body</td> <td>Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) terlambat dikumpulkan oleh Tim Evaluator body</td> <td> Nilai kemungkinan, Dampak, Tingkat Risiko Residual 0, sebaiknya untuk nilai tersebut jika belum ada penanganan maka disamakan dengan Nilai kemungkinan. </td> </tr> </tbody> </table>					Kategori Penyebab Risiko Fraud	Pengendalian	Sisa Risiko	Rekomendasi Evaluator	--Penyebab Risiko Fraud--	Tim Evaluator memberikan sosialisasi kepada OPD untuk pemenuhan data pendukung PMRB body	Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) terlambat dikumpulkan oleh Tim Evaluator body	Nilai kemungkinan, Dampak, Tingkat Risiko Residual 0, sebaiknya untuk nilai tersebut jika belum ada penanganan maka disamakan dengan Nilai kemungkinan.															
Kategori Penyebab Risiko Fraud	Pengendalian	Sisa Risiko	Rekomendasi Evaluator																								
--Penyebab Risiko Fraud--	Tim Evaluator memberikan sosialisasi kepada OPD untuk pemenuhan data pendukung PMRB body	Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) terlambat dikumpulkan oleh Tim Evaluator body	Nilai kemungkinan, Dampak, Tingkat Risiko Residual 0, sebaiknya untuk nilai tersebut jika belum ada penanganan maka disamakan dengan Nilai kemungkinan.																								

Edit
Batal

Risiko: Potensi terjadinya suatu peristiwa atau kondisi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau kinerja suatu organisasi atau proyek. Risiko dapat memiliki dampak positif atau negatif, dan umumnya terkait dengan ketidakpastian, beberapa contoh risiko:

Risiko Strategis

- Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah
- Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan

Risiko Strategis OPD 1: Dinas Kesehatan

- Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)
- Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan
- Sarana pendukung ANC kurang memadai
- Mutasi tenaga kesehatan terlatih

Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan

- Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada
- Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat
- Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot yang membutuhkan waktu lama
- Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim)
- Pertanggungjawaban tidak tepat waktu
- Pengadministrasian tidak tepat waktu

- Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan administrasi isyarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa dokumentasi
- Kegagalan mengidentifikasi permasalahan

Skenario Terjadi Risiko: Perkiraan atau gambaran tentang bagaimana suatu risiko dapat terjadi dan berdampak pada suatu organisasi atau proyek. Skenario ini membantu dalam merencanakan respons atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mengelola risiko.

Kemungkinan

3 - Kadang-kadang

--Pilih Skala Kemungkinan--

1 - Sangat Jarang

2 - Jarang

3 - Kadang-kadang

4 - Sering

5 - Sangat Sering

Kemungkinan: Tingkat probabilitas atau peluang terjadinya suatu risiko. Kemungkinan biasanya dinyatakan dalam skala atau persentase, seperti Sangat Jarang, Jarang, Kadang-kadang, Sering dan Sangat Sering, beberapa contoh skala kemungkinan dan dampak

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	B	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis					
1	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.19.01.01.01	3	3	9
2	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	4	4	16
II Risiko Strategis OPD 1: Dinas Kesehatan					
1	Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSO.19.01.05.02	4	3	12
2	Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan	RSO.19.01.05.03	4	4	16
3	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.01.05.04	4	2	8
4	Mutasi tenaga kesehatan terlatih	RSO.19.01.05.10	4	3	12
III Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan					
1	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.05.02	4	4	16
2	Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.19.01.05.03	2	2	4
3	Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot yang membutuhkan waktu lama	ROO.19.01.05.04	3	2	6
4	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim)	ROO.19.01.05.09	3	1	3
5	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.19.01.05.10	4	3	12
6	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.19.01.05.11	4	2	8
7	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa Dokumentasi	ROO.19.01.05.12	4	2	8
8	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.19.01.05.13	4	3	12

LEVEL KEMUNGKINAN	JUMLAH FREKUENSI KEMUNGKINAN TERJADI DALAM 1 PERIODE	PROSENTASE KEMUNGKINAN TERJADI DALAM 1 PERIODE
Hampir Tidak Terjadi(1)	Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 periode

LEVEL KEMUNGKINAN	JUMLAH FREKUENSI KEMUNGKINAN TERJADI DALAM 1 PERIODE	PROSENTASE KEMUNGKINAN TERJADI DALAM 1 PERIODE
Jarang Terjadi (2)	Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari volume transaksi dalam 1 periode
Kadang Terjadi (3)	Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d 18 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d 20% dari volume transaksi dalam 1 periode
Sering Terjadi (4)	Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d 50% dari volume transaksi dalam 1 periode
Hampir Pasti Terjadi (5)	Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun)	Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 periode

Dampak: Besarnya konsekuensi atau akibat dari terjadinya suatu risiko. Dampak dapat berupa kerugian finansial, kerusakan reputasi, atau gangguan pada operasional organisasi atau proyek, beberapa contoh dampak :

Risiko Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan

Dampak

- AKI tinggi
- AKB tinggi
- Akaba
- Peningkatan kasus gizi buruk
- Kasus HIV meningkat
- Kasus TB meningkat
- Angka kejadian Penyakit Tidak
- Menular (PTM) tinggi
- Angka kejadian Penyakit
- Menular tinggi
- Angka stunting tinggi

Dampak

3 - Sedang

--Pilih Skala Dampak--

1 - Sangat Rendah

2 - Rendah

3 - Sedang

4 - Tinggi

5 - Sangat Tinggi

Uraian Dampak: Penjelasan lebih lanjut tentang akibat atau konsekuensi dari terjadinya suatu risiko. Uraian dampak ini dapat membantu dalam memahami potensi kerugian atau dampak yang dapat terjadi.

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian negara ≤ Rp10 Juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu periode

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
Minor (2)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d Rp50 Juta	Keluhan stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu periode
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu periode
Signifikan (4)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp100 Juta s.d Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu periode
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja ≤ 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode

Kategori Risiko: Pengelompokan risiko berdasarkan karakteristik atau sifatnya. Kategori risiko dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko secara lebih efektif. Kategori risiko adalah cara untuk mengelompokkan risiko berdasarkan sifat atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh risiko tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai kategori risiko yang dimaksud:

- **Pendapatan:** Risiko yang terkait dengan penurunan atau ketidakpastian dalam penerimaan pendapatan, seperti penurunan permintaan pasar atau perubahan regulasi yang mempengaruhi pendapatan.
- **Belanja:** Risiko yang terkait dengan peningkatan atau ketidakpastian dalam belanja, seperti kenaikan harga bahan baku atau biaya produksi.
- **Pembiayaan:** Risiko yang terkait dengan pengelolaan sumber pembiayaan, seperti risiko kredit atau risiko likuiditas.
- **Strategis:** Risiko yang terkait dengan keputusan strategis perusahaan atau organisasi, seperti perubahan pasar atau perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi posisi kompetitif.
- **Fraud:** Risiko yang terkait dengan kecurangan atau tindakan yang tidak jujur yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi.
- **Kepatuhan:** Risiko yang terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan atau kebijakan yang berlaku, seperti pelanggaran hukum atau peraturan pemerintah.
- **Operasional:** Risiko yang terkait dengan operasional perusahaan atau organisasi, seperti kegagalan sistem atau proses yang dapat menyebabkan kerugian.
- **Reputasi:** Risiko yang terkait dengan reputasi perusahaan atau organisasi, seperti berita negatif atau persepsi negatif dari masyarakat atau pemangku kepentingan.
- **PEMDA:** Risiko yang terkait dengan kebijakan atau keputusan pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi operasional atau keberlangsungan usaha.

Kategori Risiko

Operasional

--Pilih Kategori--

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

Strategis

Fraud

Kepatuhan

Operasional

Reputasi

Strategis PEMDA

Mitra

- **Mitra:** Risiko yang terkait dengan hubungan atau kerjasama dengan mitra bisnis, seperti kegagalan mitra dalam memenuhi kewajibannya atau konflik kepentingan dengan mitra.

Kategori Risiko Fraud: Pengelompokan risiko yang terkait dengan potensi tindakan penipuan atau kecurangan. Kategori ini memfokuskan pada risiko-risiko yang berkaitan dengan kecurangan atau fraud, Berikut adalah penjelasan mengenai kategori risiko fraud yang dimaksud:

- **Perbuatan Merugikan Negara:** Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerugian keuangan atau materiil bagi negara atau keuangan negara. Contohnya adalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
- **Suap:** Memberikan atau menerima sesuatu yang bernilai sebagai imbalan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas jabatan. Suap bertujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang berwenang dalam jabatannya.
- **Gratifikasi:** Pemberian sesuatu yang bernilai kepada pejabat atau pegawai negeri sebagai imbalan atas tindakan atau pengabaian tindakan dalam jabatannya. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, atau fasilitas lainnya yang diberikan dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat.
- **Penggelapan dalam Jabatan:** Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pegawai atau pejabat yang menguasai uang atau barang milik negara atau pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya, dengan maksud untuk menguasai sendiri atau orang lain yang bukan yang berhak.
- **Pemerasan:** Memaksa seseorang dengan ancaman atau kekerasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang merugikan dirinya atau orang lain. Pemerasan juga dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan untuk memberikan uang atau barang berharga.
- **Perbuatan Curang:** Tindakan yang tidak jujur atau tidak adil dalam menjalankan tugas atau pekerjaan, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain.
- **Benturan Kepentingan:** Terjadi ketika kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak seharusnya mempengaruhi keputusan atau tindakan seorang pejabat atau pegawai dalam menjalankan tugasnya. Benturan kepentingan dapat mengarah pada tindakan yang tidak objektif atau tidak adil dalam pengambilan keputusan.

Kategori Risiko Fraud

--Pilih Kategori Fraud--

--Pilih Kategori Fraud--

Perbuatan Merugikan Negara

Suap

Gratifikasi

Penggelapan dalam Jabatan

Pemerasan

Perbuatan Curang

Benturan Kepentingan

Penyebab: Faktor atau kondisi yang menyebabkan terjadinya suatu risiko. Penyebab dapat berupa kelemahan dalam sistem, kebijakan yang tidak efektif, atau faktor lain yang dapat memicu terjadinya risiko.

Faktor Penyebab: Hal-hal yang mempengaruhi atau mendukung terjadinya suatu risiko. Faktor penyebab ini dapat membantu dalam mengidentifikasi akar penyebab dari suatu risiko.

Faktor penyebab risiko yang dikenal dengan istilah 5M (Man, Money, Method, Machine, Material) dalam konteks manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- **Man (Tenaga Kerja):**
 - Kurangnya keterampilan atau pelatihan yang diperlukan untuk tugas tertentu.
 - Kurangnya motivasi atau keterlibatan ASN.
 - Ketidakcocokan antara ASN dan peran atau tanggung jawab mereka.
- **Money (Keuangan):**
 - Keterbatasan anggaran atau sumber daya keuangan.
 - Ketidakmampuan dalam mengelola atau mengalokasikan dana dengan efisien.

Faktor Penyebab

Man

--Pilih Penyebab--

Man

Money

Method

Machine

Material

- Fluktuasi nilai tukar mata uang yang merugikan.
- 1. **Method (Metode atau Proses):**
 1. Kebijakan atau prosedur yang tidak efektif atau tidak efisien.
 2. Kurangnya pemantauan atau evaluasi terhadap proses kerja.
 3. Kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan atau tantangan.
- **Machine (Peralatan atau Mesin):**
 - Kerusakan atau kegagalan peralatan yang dapat menghambat produksi atau operasional.
 - Keterbatasan kapasitas atau teknologi peralatan yang digunakan.
 - Kurangnya perawatan atau pemeliharaan yang tepat terhadap peralatan.
- **Material (Bahan Baku atau Material):**
 - Keterlambatan atau kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau material.
 - Kualitas bahan baku atau material yang buruk.
 - Fluktuasi harga bahan baku atau material yang merugikan.

Faktor-faktor ini dapat menyebabkan risiko dalam berbagai aspek operasional perusahaan, dan manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan faktor-faktor ini untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif.

Kategori Penyebab Risiko Fraud: Pengelompokan faktor atau kondisi penyebab risiko yang terkait dengan kecurangan atau fraud. Kategori ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor penyebab risiko fraud.

Penyebab risiko fraud dapat dijelaskan melalui konsep "fraud triangle" yang terdiri dari tiga faktor utama, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi:

Kategori Penyebab Risiko Fraud

--Penyebab Risiko Fraud--

--Penyebab Risiko Fraud--
Tekanan
Kesempatan
Rasionalisasi

- **Tekanan (Pressure):** Tekanan merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan curang. Tekanan ini bisa bersifat finansial, seperti masalah keuangan pribadi (utang yang menumpuk, kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi), atau tekanan dari atasan dalam mencapai target atau kinerja tertentu.
- **Kesempatan (Opportunity):** Kesempatan merujuk pada situasi atau kondisi di mana seseorang memiliki peluang untuk melakukan tindakan curang tanpa sepengetahuan atau pengawasan yang memadai. Kesempatan untuk melakukan fraud bisa muncul akibat kelemahan dalam sistem pengendalian internal, seperti kekurangan pengawasan, prosedur yang lemah, atau akses yang tidak terbatas terhadap aset perusahaan.
- **Rasionalisasi (Rationalization):** Rasionalisasi adalah cara seseorang untuk membenarkan tindakan curang yang dilakukannya. Ini bisa berupa pembenaran bahwa tindakan tersebut dilakukan karena situasi atau kondisi tertentu yang memaksa, atau keyakinan bahwa tindakan tersebut tidak akan merugikan pihak lain atau bahkan dianggap sebagai "balas jasa" atas pengalaman atau kinerja kerja yang dianggap kurang dihargai.

Pengendalian: Langkah-langkah atau mekanisme yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko atau mengurangi dampak risiko jika terjadi. Pengendalian ini bertujuan untuk memitigasi risiko secara efektif.

Sisa Risiko: Tingkat risiko yang tetap ada setelah dilakukan pengendalian atau mitigasi. Sisa risiko ini harus dipantau dan dikelola secara terus-menerus untuk memastikan bahwa risiko tersebut tetap dalam batas yang dapat diterima.

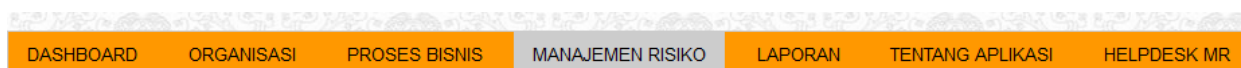
2. Rencana Penanganan Risiko

Rencana Penanganan Risiko PEMDA (Pemerintah Daerah) adalah dokumen yang merinci langkah-langkah yang akan diambil untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan memantau risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Rencana ini bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.

Pendekatan dalam rencana penanganan risiko PEMDA mencakup langkah-langkah berikut:

- **Identifikasi Risiko:** Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh PEMDA, baik risiko yang bersifat internal maupun eksternal.
- **Penilaian Risiko:** Menilai dampak dan probabilitas terjadinya risiko-risiko yang telah diidentifikasi untuk menentukan tingkat risiko yang dihadapi.
- **Pengelolaan Risiko:** Menetapkan strategi untuk mengelola risiko, seperti menerima risiko, menghindari risiko, memindahkan risiko, atau mengurangi risiko.
- **Implementasi Tindakan Pengendalian:** Melaksanakan tindakan pengendalian yang telah direncanakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah diidentifikasi.
- **Pemantauan dan Pengawasan:** Memantau dan mengevaluasi efektivitas tindakan pengendalian yang telah dilaksanakan serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Rencana Penanganan Risiko PEMDA dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan, untuk input Rencana Penanganan Risiko masuk ke menu Manajemen Risiko



Setelah itu klik sub menu **Rencana Penanganan Risiko**



Akan muncul layar sebagai berikut:



SI-MERI
 SISTEM INFORMASI
 MONITORING MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI




DASHBOARD ORGANISASI PROSES BISNIS MANAJEMEN RISIKO LAPORAN TENTANG APLIKASI IMAM KUSNADI, S.E., M.AB.,CFRA, CRGP LOGOUT

Pengumuman : Batas Penginputan Identifikasi Risiko dapat diinput sampai tanggal 28-02-2025 (tinggal 25 hari 0 jam)

IDENTIFIKASI RISIKO
 DAFTAR RISIKO
 RENCANA PENANGANAN RISIKO
 REALISASI PENANGANAN RISIKO
 PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

DOWNLOAD RENCANA PENANGANAN RISIKO FORMAT PDF

RENCANA PENANGANAN RISIKO PADA PD INSPEKTORAT DAERAH

No	Risiko	Penyebab	Risiko Inherent	Penanganan Yang Sudah Ada	Opis dan Langkah Pengendalian	Rencana Penanganan	Rencana Pelaksanaan	Indikator Output	PIC	Anggaran
1	Konflik kepentingan	Keterlibatan mitra dalam bisnis atau kegiatan yang bersaling atau bertentangan (a Lanjut Baca)	4	Konflik kepentingan yang dikelola: Menetapkan prosedur pengelolaan konflik kepen (Lanjut Baca)	Opis Pengendalian 1 : TUJUAN Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/ prioritanya Opis Pengendalian 2 : - Langkah Pengendalian : -		Mulai : Selesai :			0,00
2	Keterbatasan sumber daya keuangan	Risiko keuangan yang paling umum adalah keterbatasan sumber daya keuangan yang d (Lanjut Baca)	6	-	Opis Pengendalian 1 : TUJUAN Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/ prioritanya Opis Pengendalian 2 : - Langkah Pengendalian : -		Mulai : Selesai :			0,00
3	Kelebihan pembayaran perjalanan dinas	PPK dan PPTK kurang teliti dalam proses penyisipan dokumen administrasi belanja (Lanjut Baca)	6	pemeriksaan dokumen belanja lebih dan teliti membuat kartu kendali	Opis Pengendalian 1 : TUJUAN Langkah Pengendalian : hanya perlu pemantauan singkat, Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat meningkat statusnya/ prioritanya		Mulai : Selesai :			0,00

Pada tampilan diatas klik **Buat Rencana** untuk membuat rencana penanganan risiko, atau **Edit Rencana** untuk edit rencana penanganan risiko yang sudah dilakukan dibuat rencananya

Tambah Rencana Penanganan Risiko

Proses Bisnis Risiko Keselamatan Risiko Kondisi kerja yang tidak aman Penyebab -Tekanan waktu dan produktivitas: Tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dapat mengurangi perhatian terhadap faktor keselamatan. Pekerja yang terburu-buru atau stres cenderung mengabaikan prosedur keselamatan yang tepat. Penanganan Yang Sudah Ada -Komunikasi yang efektif: Tetap menjalin komunikasi yang terbuka dan jelas dengan mitra kerja mengenai kebijakan, prosedur, dan harapan keselamatan kerja. Pastikan mereka memahami pentingnya kepatuhan terhadap standar keselamatan yang ditetapkan oleh perusahaan.	Deskripsi RTP B I [Icons] body Plan Mulai mm / dd / yyyy Plan Selesai mm / dd / yyyy Indikator Output B I [Icons] body PIC -- Pilih -- Status Open Simpan Batal
--	--

Setelah itu isikan data-data dimasing-masing kolom sebagai berikut:

Dalam konteks rencana penanganan risiko, deskripsi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) mengacu pada dokumen yang merinci langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola risiko tertentu.

Deskripsi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah penjelasan atau uraian mengenai langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. RTP ini merupakan bagian dari proses manajemen risiko di mana setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merencanakan cara untuk mengurangi dampak negatif dari risiko tersebut.

Dalam RTP, biasanya akan dijelaskan dengan detail mengenai:

- Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko.
- Langkah-langkah yang akan diambil jika risiko tersebut terjadi untuk meminimalkan dampaknya.
- Penanggung jawab atau tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan RTP.
- Waktu pelaksanaan dan target yang ingin dicapai dari RTP.

untuk mengimplementasikan tindakan-tindakan yang telah direncanakan untuk mengendalikan risiko-risiko yang ada. Dengan demikian, RTP membantu organisasi untuk lebih siap menghadapi risiko dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko tersebut.

Rencana Mulai (Start): Waktu atau tanggal mulai pelaksanaan langkah-langkah penanganan risiko yang direncanakan.

Rencana Selesai (Finish): Waktu atau tanggal perkiraan selesainya langkah-langkah penanganan risiko yang direncanakan.

Indikator Output: Parameter atau ukuran yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan dari langkah-langkah penanganan risiko yang dilakukan. Indikator ini membantu dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas dari rencana penanganan risiko.

PIC (Person In Charge): Orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah penanganan risiko yang direncanakan. PIC biasanya memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memastikan bahwa langkah-langkah tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Status: Status pelaksanaan dari langkah-langkah penanganan risiko, apakah sedang berjalan, selesai, tertunda, atau ada masalah dalam pelaksanaannya.

Deskripsi RTP merupakan bagian penting dari rencana penanganan risiko karena membantu dalam mengarahkan dan mengatur upaya penanganan risiko dengan lebih terstruktur dan terukur.

3. Realisasi Penanganan Risiko

Realisasi Penanganan Risiko PEMDA mengacu pada implementasi dan pelaksanaan langkah-langkah yang telah direncanakan dalam rencana penanganan risiko untuk mengurangi atau mengelola risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Realisasi ini melibatkan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan, dan memonitor risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan tujuan dan program-program Pemerintah Daerah.

Realisasi penanganan risiko PEMDA dapat mencakup berbagai tindakan, seperti:

- **Penerapan Pengendalian Internal:** Implementasi prosedur atau kebijakan baru untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap risiko yang diidentifikasi. Penerapan Pengendalian Internal dalam konteks manajemen risiko adalah langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengimplementasikan prosedur atau kebijakan baru guna meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap

risiko yang telah diidentifikasi. Penerapan pengendalian internal merupakan bagian integral dari manajemen risiko yang efektif, karena membantu organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Dengan penerapan pengendalian internal yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kerugian, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

- **Pelaksanaan Program Pelatihan dan Sadar Risiko:** Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan sadar akan risiko serta tindakan yang harus diambil untuk menguranginya.

Pelaksanaan Program Pelatihan dan Sadar Risiko adalah langkah yang penting dalam manajemen risiko untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap risiko di kalangan karyawan atau anggota organisasi. Program ini bertujuan untuk mengedukasi mereka tentang jenis-jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi, serta tindakan yang harus diambil untuk mengurangi risiko tersebut. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam program pelatihan ini antara lain:

Identifikasi Risiko: Memberikan pemahaman tentang cara mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam aktivitas sehari-hari organisasi.

Analisis Risiko: Mengajarkan teknik analisis risiko untuk menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.

Pengelolaan Risiko: Memberikan pengetahuan tentang berbagai strategi pengelolaan risiko, seperti pencegahan, mitigasi, transfer, atau penerimaan risiko.

Komunikasi Risiko: Mengajarkan cara efektif untuk berkomunikasi tentang risiko, baik secara internal maupun eksternal.

Kesadaran Risiko: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen risiko dalam mencapai tujuan organisasi.

Peran Individu: Menjelaskan peran individu dalam manajemen risiko dan pentingnya kontribusi setiap orang dalam mengurangi risiko organisasi.

Dengan melaksanakan program pelatihan dan sadar risiko secara teratur, organisasi dapat membangun budaya yang lebih baik dalam mengelola risiko, sehingga dapat mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan organisasi.

- **Penetapan Anggaran dan Sumber Daya:** Mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tindakan penanganan risiko yang direncanakan. Penetapan Anggaran dan Sumber Daya dalam konteks manajemen risiko adalah langkah penting untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang cukup guna melaksanakan tindakan penanganan risiko yang direncanakan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai langkah ini:

Penentuan Anggaran: Proses untuk menetapkan jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan penanganan risiko yang telah direncanakan. Anggaran ini harus mencakup semua biaya yang terkait dengan implementasi pengendalian internal, seperti biaya teknologi baru, pelatihan ASN, atau perubahan proses operasional.

Alokasi Sumber Daya: Selain anggaran, perlu juga dilakukan alokasi sumber daya manusia dan materiil yang cukup untuk melaksanakan tindakan penanganan risiko. Ini termasuk penugasan personel yang kompeten untuk mengelola dan melaksanakan pengendalian internal, serta pengalokasian peralatan atau teknologi yang diperlukan.

Pemantauan Pengeluaran: Selama pelaksanaan tindakan penanganan risiko, penting untuk memantau pengeluaran dan penggunaan anggaran serta sumber daya lainnya. Hal ini membantu memastikan bahwa pengeluaran tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan tidak melebihi batas yang telah ditetapkan.

Evaluasi Kembali Anggaran dan Sumber Daya: Setelah pelaksanaan tindakan penanganan risiko, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya. Jika diperlukan, anggaran dan sumber daya dapat direvisi untuk memastikan bahwa mereka masih mencukupi untuk mengendalikan risiko yang diidentifikasi.

Penetapan Anggaran dan Sumber Daya merupakan bagian penting dari manajemen risiko yang efektif karena membantu organisasi untuk mengalokasikan dana dan sumber daya yang diperlukan untuk mengendalikan risiko. Dengan mengelola anggaran dan sumber daya dengan baik, organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi risiko dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif.

- **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas langkah-langkah penanganan risiko yang telah dilaksanakan serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Monitoring dan Evaluasi dalam konteks manajemen risiko adalah proses yang dilakukan secara berkala untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah penanganan risiko yang telah dilaksanakan, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai langkah-langkah ini:

Pemantauan: Proses pemantauan dilakukan untuk mengawasi implementasi langkah-langkah penanganan risiko sehari-hari. Ini melibatkan pemantauan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mengukur efektivitas pengendalian internal. Pemantauan dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan sistem informasi manajemen risiko.

Evaluasi: Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah langkah-langkah penanganan risiko yang telah dilaksanakan telah efektif dalam mengurangi risiko yang

diidentifikasi. Evaluasi ini dapat melibatkan analisis data, wawancara dengan personel terkait, dan tinjauan dokumentasi.

Jika hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan bahwa langkah-langkah penanganan risiko tidak efektif atau ada perubahan dalam konteks risiko, maka perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian dapat berupa perubahan dalam prosedur atau kebijakan, penambahan sumber daya, atau perbaikan dalam implementasi pengendalian internal.

Pelaporan: Hasil monitoring dan evaluasi, serta langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan, harus dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan, seperti manajemen atau dewan direksi. Pelaporan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen risiko.

Monitoring dan Evaluasi merupakan bagian integral dari manajemen risiko yang efektif, karena membantu organisasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah penanganan risiko yang telah dilaksanakan berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur, organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola risiko dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif.

- **Pelaporan:** Melaporkan hasil dari realisasi penanganan risiko kepada pihak yang berwenang atau pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pelaporan dalam konteks manajemen risiko adalah proses melaporkan hasil dari realisasi penanganan risiko kepada pihak yang berwenang atau pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama dari pelaporan ini adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen risiko.

Identifikasi Penerima Laporan: Langkah pertama dalam pelaporan adalah mengidentifikasi pihak yang berwenang atau pemangku kepentingan yang perlu menerima laporan mengenai penanganan risiko.

Penyusunan Laporan: Laporan mengenai hasil dari realisasi penanganan risiko disusun dengan jelas dan ringkas. Laporan ini harus mencakup informasi mengenai risiko yang diidentifikasi, langkah-langkah penanganan risiko yang telah dilaksanakan, hasil pemantauan dan evaluasi, serta langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan.

Distribusi Laporan: Setelah disusun, laporan tersebut didistribusikan kepada pihak yang berwenang atau pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kebijakan organisasi. Distribusi dapat dilakukan secara langsung, melalui surat, atau melalui sistem informasi manajemen risiko yang telah ada.

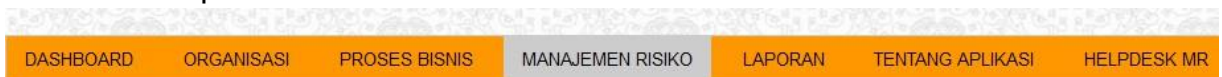
Pemantauan Penggunaan Laporan: Setelah laporan didistribusikan, penting untuk memantau penggunaan dan tanggapan terhadap laporan tersebut. Hal ini membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan dapat

Digunakan dengan efektif untuk pengambilan keputusan.

Evaluasi Proses Pelaporan: Proses pelaporan juga perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa proses tersebut efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan.

Pelaporan dalam manajemen risiko adalah bagian penting dari proses manajemen risiko yang efektif, karena membantu memastikan bahwa informasi mengenai risiko dan langkah-langkah penanganannya dapat disampaikan dengan jelas dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pelaporan dapat membantu organisasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan untuk mengelola risiko dengan lebih efektif.

Realisasi penanganan risiko PEMDA sangat penting untuk membantu mengurangi dampak risiko terhadap kegiatan dan program Pemerintah Daerah serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan.



Setelah itu klik sub menu **Realisasi Penanganan Risiko**



Akan muncul layar sebagai berikut:



Pada tampilan diatas klik **Buat Realisasi** untuk membuat realisasi penanganan risiko, atau **Edit Realisasi** untuk edit realisasi penanganan risiko yang sudah dilakukan dibuat rencananya

REALISASI PENANGANAN RISIKO PADA PD INSPEKTORAT DAERAH

PIC SUSANTO, S.E., Ak.CA., M.M.	Plan Mulai 09 / 01 / 2023	Real Mulai mm / dd / yyyy
SOP Risiko Kinerja	Plan Selesai 12 / 29 / 2023	Real Selesai mm / dd / yyyy
Risiko Keterlambatan dalam penyelesaian proyek	Skala Kemungkinan Inheren 2	Skala Kemungkinan terjadi setelah mitigasi -
Penyebab Hal ini dapat disebabkan oleh faktor seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya keahlian atau pengalaman, atau perubahan lingkungan yang tidak	Skala Dampak Inheren 4	Skala Dampak terjadi setelah mitigasi -
Deskripsi RTP -	Risiko Inheren 8	Hambatan -
	Indikator Output -	Status Risiko 1 - Open

Setelah itu isikan data-data dimasing-masing kolom sebagai berikut:

- **Real Mulai (Real Start):** Waktu atau tanggal sebenarnya dimulainya pelaksanaan langkah-langkah penanganan risiko yang telah direncanakan.
- **Real Selesai (Real Finish):** Waktu atau tanggal sebenarnya selesainya pelaksanaan langkah-langkah penanganan risiko yang direncanakan.
- **Skala Kemungkinan terjadi setelah mitigasi:** Skala yang digunakan untuk menilai tingkat kemungkinan terjadinya risiko setelah dilakukan tindakan mitigasi. Skala ini biasanya berupa angka atau kategori yang menunjukkan tingkat kemungkinan dari rendah hingga tinggi.

- **Skala Dampak terjadi setelah mitigasi:** Skala yang digunakan untuk menilai tingkat dampak risiko yang mungkin terjadi setelah dilakukan tindakan mitigasi. Skala ini juga biasanya berupa angka atau kategori yang menunjukkan tingkat dampak dari rendah hingga tinggi.
- **Hambatan:** Faktor-faktor yang dapat menghambat atau menghambat pelaksanaan langkah-langkah penanganan risiko. Hambatan ini bisa berupa keterbatasan sumber daya, kendala teknis, atau faktor-faktor lain yang dapat memperlambat atau menghambat implementasi rencana penanganan risiko.
- **Status Risiko:** Status aktual dari risiko setelah dilakukan tindakan mitigasi. Status ini dapat berupa "OPEN" jika risiko penanganan masih dilakukan atau "CLOSE" jika risiko sudah tidak terjadi.

Pemangku kepentingan dapat memantau dan mengevaluasi realisasi penanganan risiko dengan lebih efektif, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang diidentifikasi dapat dikelola dengan baik.

4. Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Event)

Pencatatan kejadian risiko (risk event) merupakan proses penting dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mendokumentasikan semua kejadian atau situasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Pencatatan ini dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk membantu dalam identifikasi, evaluasi, dan penanganan risiko secara efektif.

Dalam pencatatan kejadian risiko, informasi yang dicatat meliputi jenis risiko, faktor penyebab risiko, dampak potensial, tingkat kemungkinan terjadinya, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengelola risiko tersebut. Pencatatan dilakukan dalam format yang jelas dan mudah dipahami, sehingga informasi dapat dengan cepat diakses dan dianalisis oleh pihak yang berkepentingan.

Pencatatan kejadian risiko juga mencakup pengumpulan data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber, termasuk laporan kejadian yang terjadi, hasil evaluasi risiko, serta informasi terkait kondisi internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi risiko. Data yang terkumpul ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau tren risiko yang mungkin timbul.

Selain itu, pencatatan kejadian risiko juga memungkinkan untuk melakukan pelacakan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, termasuk menetapkan tanggung jawab, mengukur efektivitas tindakan mitigasi, dan mengevaluasi kinerja manajemen risiko secara keseluruhan. Dengan demikian, pencatatan kejadian risiko menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam mengelola risiko secara proaktif dan preventif.

Pencatatan kejadian risiko juga dapat digunakan sebagai alat untuk membangun basis pengetahuan (knowledge base) tentang risiko-risiko yang dihadapi oleh organisasi, sehingga pengalaman dan pembelajaran dari kejadian risiko masa lalu dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen risiko di masa depan. Selain itu, pencatatan kejadian risiko juga penting dalam mendukung pelaporan risiko kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, seperti manajemen senior, dewan direksi, dan regulator.

Dalam praktiknya, pencatatan kejadian risiko dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga informasi yang terdokumentasi dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam mengelola risiko organisasi. Dengan demikian, pencatatan kejadian risiko merupakan bagian integral dari proses manajemen risiko yang efektif dan efisien. Realisasi penanganan risiko PEMDA dapat mencakup berbagai tindakan, seperti:

Langkah-langkah pencatatan kejadian risiko (risk event) secara umum dapat dilakukan sebagai berikut:

- Identifikasi Kejadian Risiko: Identifikasi semua kejadian atau situasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- Klasifikasi Risiko: Klasifikasikan kejadian risiko berdasarkan jenis risiko, sumber risiko, atau karakteristik lain yang relevan.
- Penilaian Risiko: Nilai tingkat risiko dari setiap kejadian risiko berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan dampaknya.
- Pencatatan Data: Catat data-data terkait kejadian risiko, termasuk jenis risiko, faktor penyebab, dampak potensial, dan tingkat kemungkinan terjadinya.
- Analisis Risiko: Analisis data yang tercatat untuk mengidentifikasi pola atau tren risiko yang mungkin timbul.
- Pengukuran Efektivitas: Ukur efektivitas tindakan mitigasi yang telah dilakukan terhadap kejadian risiko.
- Pelacakan dan Pemantauan: Lacak dan monitor kejadian risiko serta tindakan mitigasi yang telah dilakukan.
- Pelaporan dan Komunikasi: Laporkan kejadian risiko kepada pihak yang berkepentingan internal dan eksternal, seperti manajemen senior, dewan direksi, dan regulator.
- Evaluasi dan Pembelajaran: Evaluasi kinerja manajemen risiko berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dari kejadian risiko masa lalu.
- Perbaikan Berkelanjutan: Terapkan perbaikan berkelanjutan dalam proses pencatatan kejadian risiko berdasarkan pembelajaran yang diperoleh.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, organisasi dapat memastikan bahwa pencatatan kejadian risiko dilakukan secara sistematis dan komprehensif, sehingga informasi yang terdokumentasi dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan

keputusan yang tepat dalam mengelola risiko organisasi. Realisasi penanganan risiko PEMDA sangat penting untuk membantu mengurangi dampak risiko terhadap kegiatan dan program Pemerintah Daerah serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Setelah itu klik sub menu **Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Event)**

Akan muncul layar sebagai berikut:

IDENTIFIKASI RISIKO

DAFTAR RISIKO

RENCANA PENANGANAN RISIKO

REALISASI PENANGANAN RISIKO

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

User profile picture



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1234

DASHBOARD

ORGANISASI

PROSES BISNIS

MANAJEMEN RISIKO

LAPORAN

TENTANG APLIKASI

HELPDESK MR

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LOGOUT

Pengumuman : Batas Penginputan Identifikasi Risiko dapat diinput sampai tanggal 31-12-2024 (tinggal 243 hari 0 jam)

IDENTIFIKASI RISIKO

DAFTAR RISIKO

RENCANA PENANGANAN RISIKO

REALISASI PENANGANAN RISIKO

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

User profile picture



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1234

RISK EVENT PENANGANAN RISIKO PADA PD INSPEKTORAT DAERAH

No	Risiko	Tanggal Kejadian Risiko	Sebab Kejadian Risiko	Dampak Kejadian Risiko	Data Dukung	Rencana Penanganan	Realisasi Tanggal	Informasi Risk	Output	PIC	Realisasi Tanggal	Residual Risk	Ten	Aksi
1	Identifikasi dalam penyelesaian proyek	00:00:0000					Mulai: 01 Sep 2023 Selesai: 28 Sep 2023	Risiko Inherent = 8 (Sangat Tinggi) [P = 4, D = 4]		SURYANTO, S.E., A.A. CA., M.M.	Mulai: 01 Sep 2023 Selesai: 28 Sep 2023	Risiko Residual = 9 (Sangat Tinggi) [P = 4, D = 5]	Tinggi	Tambah Risk Event
2	Tertambatnya Penyempurnaan Laporan Hasil Pemantauan	19 Agi 2023	sewa	empat	Download Upload File	Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dan pihak yang menjadi objek pemantauan agar penyempurnaan laporan hasil pemantauan tepat waktu.	Mulai: 01 Feb 2022 Selesai: 11 Feb 2022	Risiko Inherent = 12 (Sangat Tinggi) [P = 4, D = 3]	Laporan yang dihasilkan sesuai rencana dan dapat digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab.	RADEN JULYANTI, NURJANANAH, S.P.T., M.T.	Mulai: 19 Feb 2022 Selesai: 17 Mar 2022	Risiko Residual = 1 (Sangat Rendah) [P = 1, D = 1]	Tinggi	Edit Risk Event dan RTP
3	Laporan Pemantauan Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) tertambat diumumkan oleh Tim Evaluasi	00:00:0000				Dalam Substansi bagi pegawai yang melakukan pengumpulan data pendukung RIB di Aplikasi PMRB	Mulai: 08 Mar 2022 Selesai: 12 Mar 2022	Risiko Inherent = 9 (Sangat Tinggi) [P = 3, D = 3]	Tertaksennanya Dalam Substansi bagi pegawai OPD	RADEN JULYANTI, NURJANANAH, S.P.T., M.T.	Mulai: 27 Apr 2022 Selesai: 28 Sep 2022	Risiko Residual = 8 (Sangat Tinggi) [P = 2, D = 4]	Tinggi	Tambah Risk Event
4	Visibilitas WBS tidak berjalan secara optimal	00:00:0000				Sosialisasi WBS kepada seluruh OPD. Pengukuran Tim WBS	Mulai: 03 Jan 2022 Selesai: 31 Mar 2022	Risiko Inherent = 12 (Sangat Tinggi) [P = 4, D = 4]	Laporan Sosialisasi WBS	YUSRIANDIYAH, S.T., M.M.	Mulai: 01 Jan 2022 Selesai: 30 Mar 2022	Risiko Residual = 4 (Sangat Rendah) [P = 2, D = 2]	Tinggi	Tambah Risk Event

Pada tampilan diatas klik

Tambah Risk Event

untuk Pencatatan Kejadian Risiko (Risk

Event), atau

Edit Risk Event dan RTP

untuk edit Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Event) yang sudah dilakukan dibuat rencananya

Tambah Realisasi Penanganan Risiko

SOP Risiko Kinerja	Plan Mulai 09 / 01 / 2023	Real Mulai mm / dd / yyyy
Risiko Keterlambatan dalam penyelesaian proyek	Plan Selesai 12 / 29 / 2023	Real Selesai mm / dd / yyyy
Tanggal Kejadian Risiko mm / dd / yyyy	Skala Kemungkinan Inheren 2	Skala Kemungkinan terjadi setelah mitigasi ▼
Sebab Kejadian Risiko 	Skala Dampak Inheren 4	Skala Dampak terjadi setelah mitigasi ▼
Dampak Kejadian Risiko 	Risiko Inheren 8	Hambatan
	Indikator Output -	Tren Risiko (isikan --> Naik, Turun, Tetap) ▼
	PIC SUSANTO, S.E., Ak.CA., M.M.	Status Risiko 1 - Open

Simpan
Batal

Setelah itu isikan data-data dimasing-masing kolom sebagai berikut:

- **Tanggal Kejadian Risiko:** Merupakan tanggal atau rentang waktu di mana suatu risiko diperkirakan akan terjadi atau telah terjadi. Informasi ini penting untuk memantau jadwal dan perencanaan mitigasi risiko.
- **Sebab Kejadian Risiko:** Menjelaskan faktor atau kondisi yang menyebabkan terjadinya risiko. Memahami sebab risiko membantu dalam merancang strategi mitigasi yang efektif.
- **Dampak Kejadian Risiko:** Merupakan konsekuensi atau akibat yang dapat terjadi akibat dari terjadinya risiko. Mengetahui dampak risiko membantu dalam mengevaluasi tingkat urgensi dan prioritas mitigasi.
- **Plan Mulai:** Tanggal atau waktu rencana untuk memulai implementasi rencana mitigasi risiko. Informasi ini penting untuk memastikan kesiapan dalam menangani risiko.
- **Plan Selesai:** Tanggal atau waktu rencana untuk menyelesaikan implementasi rencana mitigasi risiko. Mengetahui kapan rencana harus selesai membantu dalam pengaturan prioritas dan alokasi sumber daya.
- **Real Mulai:** Tanggal atau waktu aktual dimulainya implementasi rencana mitigasi risiko. Memantau perbedaan antara rencana dan realisasi membantu dalam evaluasi kinerja proyek dan penyesuaian rencana ke depan.
- **Real Selesai:** Tanggal atau waktu aktual penyelesaian implementasi rencana mitigasi risiko. Informasi ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas rencana mitigasi dan memperbaiki proses mitigasi risiko di masa depan.
- **Skala Kemungkinan terjadi setelah mitigasi:** Merupakan penilaian tingkat kemungkinan terjadinya risiko setelah mitigasi dilakukan. Skala ini membantu dalam mengukur efektivitas rencana mitigasi.
- **Skala Dampak terjadi setelah mitigasi:** Penilaian tingkat dampak yang mungkin

terjadi setelah mitigasi dilakukan. Skala ini membantu dalam menilai tingkat konsekuensi yang masih mungkin terjadi setelah risiko diatasi.

- **Hambatan:** Menjelaskan kendala atau rintangan yang menghalangi implementasi rencana mitigasi risiko. Identifikasi hambatan membantu dalam mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang timbul.
- **Tren Risiko:** Merupakan arah atau kecenderungan perubahan risiko dari waktu ke waktu. Memahami tren risiko membantu dalam mengidentifikasi pola dan mengambil tindakan yang sesuai.
- **Status Risiko:** Merupakan kondisi atau posisi terkini dari risiko dalam siklus manajemen risiko. Informasi ini membantu dalam memantau dan mengelola risiko secara efektif, ada 2 kondisi yaitu status open dan status close.

LAPORAN MANAJEMEN RISIKO

Laporan Manajemen Risiko adalah dokumen yang berisi informasi terkait identifikasi, evaluasi, penanganan, dan pemantauan risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Laporan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam mengelola risiko. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap elemen yang terdapat dalam laporan manajemen risiko:

- 1. BUKU MANAJEMEN RISIKO:** Dokumen yang berisi pedoman dan prosedur untuk melakukan manajemen risiko dalam organisasi, termasuk langkah-langkah identifikasi, evaluasi, penanganan, dan pemantauan risiko.

Buku Manajemen Risiko adalah dokumen yang berisi pedoman dan prosedur untuk melakukan manajemen risiko dalam organisasi. Buku ini mencakup langkah-langkah identifikasi, evaluasi, penanganan, dan pemantauan risiko. Beberapa poin yang biasanya termasuk dalam buku manajemen risiko ini adalah:

Pendahuluan: Penjelasan tentang pentingnya manajemen risiko dalam mencapai tujuan organisasi dan kerangka kerja umum untuk manajemen risiko.

Kebijakan Manajemen Risiko: Pernyataan resmi dari pimpinan organisasi tentang komitmen mereka terhadap manajemen risiko dan pendekatan yang akan diambil.

Struktur Manajemen Risiko: Penjelasan tentang struktur organisasi untuk manajemen risiko, termasuk peran dan tanggung jawab setiap orang dalam organisasi terkait dengan manajemen risiko.

Proses Manajemen Risiko: Langkah-langkah yang harus diikuti dalam melakukan manajemen risiko, mulai dari identifikasi risiko hingga pemantauan dan evaluasi.

Metode Identifikasi Risiko: Metode atau teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko, seperti analisis SWOT, analisis menyeluruh, atau wawancara dengan pemangku kepentingan.

Penilaian Risiko: Cara untuk menilai kemungkinan dan dampak risiko serta menentukan tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi.

Penanganan Risiko: Strategi dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko, termasuk transfer risiko atau penerimaan risiko.

Pemantauan dan Evaluasi Risiko: Proses untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah mitigasi yang diambil, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Buku Manajemen Risiko ini penting untuk membantu organisasi dalam mengelola risiko secara sistematis dan efektif. Dengan mengacu pada pedoman dan prosedur yang tercantum dalam buku ini, organisasi dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dengan lebih baik untuk mencapai tujuan mereka.






DASHBOARDORGANISASIPROSES BISNISMANAJEMEN RISIKOLAPORANTENTANG APUKASI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SIMENTARI
SISTEM INFORMASI MONITORING MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

BUKU MANAJEMEN RISIKO INSPEKTORAT DAERAH

DOWNLOAD BUKU MANAJEMEN RISIKO FORMAT PDF

DOWNLOAD LAMPIRAN I PIAGAM MANAJEMEN RISIKO FORMAT PDF

DOWNLOAD LAMPIRAN II DAFTAR PENETAPAN RENCANA FORMAT PDF

DOWNLOAD LAMPIRAN III DAFTAR RENCANA STRATEGIS PEMDA FORMAT PDF

DOWNLOAD LAMPIRAN IV DAFTAR RENCANA STRATEGIS PEMDA FORMAT PDF

DOWNLOAD LAMPIRAN V DAFTAR RENCANA STRATEGIS PEMDA FORMAT PDF

DOWNLOAD LAMPIRAN VI DAFTAR RENCANA STRATEGIS PEMDA FORMAT PDF

DOWNLOAD LAMPIRAN VII DAFTAR RENCANA STRATEGIS PEMDA FORMAT PDF

DOWNLOAD LAMPIRAN VIII DAFTAR RENCANA STRATEGIS PEMDA FORMAT PDF

DOWNLOAD LAMPIRAN IX DAFTAR RENCANA STRATEGIS PEMDA FORMAT PDF

DOWNLOAD LAMPIRAN X DAFTAR RENCANA STRATEGIS PEMDA FORMAT PDF

Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko Inspektorat Daerah



SUMATERA SELATAN

Nama	QR Code
Drs. Yunes Hani, M.Si N.I.P. : 195705051982031009 Jabatan : P. Inspektur	
Raden H. Julianti Nurdjannah, S.P., M.T. N.I.P. : 197107091967032005 Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	
Desi Sinorita, S.Kom. N.I.P. : 197203132002122004 Jabatan : Staf	



Manajemen Risiko Inspektorat Daerah

KATA PENGANTAR

Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Satuan Kerja (SKPD). Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMRI). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Salah satu tujuan dari Buku Penilaian Risiko ini, maka dapat dilihat gambaran risiko/ketidaktepatan yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai tujuan/visi/ misi yang telah ditetapkan. Sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengendalian melalui mekanisme sistem risiko.

Harapan kami, selain berguna bagi pihak internal, dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelaksanaan penilaian risiko yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh SKPD pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat turut berperan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola instansi yang baik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian, semoga bermanfaat dan diucapkan terima kasih.

Pangkep, 02 - Mei - 2024
Inspektur Daerah



SUSANTO, S.E., Ak.CA., M.M.
N.I.P. : 196306121983031001

BAB II GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH

A. Organisasi

Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko Inspektorat Daerah

Nama	Eselon	QR Code
SUSANTO, S.E., Ak.CA., M.M. N.I.P. : 196306121983031001 Jabatan : Inspektur	Eselon 2	
RADEN JULIANTI NURDJANNAH, S.P., M.T. N.I.P. : 197107091967032005 Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Eselon 3	
DESI SINORITA, S.Kom. N.I.P. : 197203132002122004 Jabatan : Sekretaris	Eselon 3	
DODY ROSMIANSYAH, SE., M.SE. N.I.P. : 197305182002121003 Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Eselon 3	
YURISMANSYAH, S.T., M.M. N.I.P. : 197403142007031003 Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan dan Investigasi	Eselon 3	
IMAN KUSNADI, S.E., MAB., CfrA., CRCP N.I.P. : 197509092008111001 Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pengembangan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	Eselon 3	

Sasaran Perangkat Daerah

- Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Indikator Kinerja Utama (IKU)

- Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan di Bawah 5%
- Persentase Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan
- Level Capaian Maturitas SPIP

2. LAPORAN PIAGAM MANAJEMEN RISIKO: Dokumen yang mendefinisikan struktur, tanggung jawab, dan otoritas dalam pelaksanaan manajemen risiko di organisasi, serta komitmen manajemen atas implementasi manajemen risiko.

Laporan Piagam Manajemen Risiko adalah dokumen yang mendefinisikan struktur, tanggung jawab, dan otoritas dalam pelaksanaan manajemen risiko di organisasi. Dokumen ini juga mencakup komitmen manajemen atas implementasi manajemen risiko. Beberapa poin yang biasanya termasuk dalam laporan ini adalah:

Pendahuluan: Penjelasan tentang pentingnya manajemen risiko dalam mencapai tujuan organisasi dan tujuan dari dokumen Piagam Manajemen Risiko.

Ruang Lingkup: Gambaran umum tentang ruang lingkup manajemen risiko yang dicakup oleh dokumen ini, termasuk unit atau bagian organisasi yang terlibat.

Tujuan dan Sasaran: Tujuan dan sasaran dari implementasi manajemen risiko dalam organisasi.

Struktur Manajemen Risiko: Struktur organisasi yang akan mengelola manajemen risiko, termasuk peran dan tanggung jawab setiap level manajemen.

Komitmen Manajemen: Pernyataan komitmen dari manajemen atas implementasi manajemen risiko, termasuk alokasi sumber daya yang diperlukan.

Proses Manajemen Risiko: Deskripsi tentang langkah-langkah yang akan diambil dalam proses manajemen risiko, mulai dari identifikasi risiko hingga pemantauan dan evaluasi.

Kebijakan Manajemen Risiko: Kebijakan organisasi terkait dengan manajemen risiko, termasuk prinsip-prinsip yang akan diikuti.

Prosedur Operasional Standar: Prosedur-operasional yang harus diikuti dalam pelaksanaan manajemen risiko, termasuk metode identifikasi risiko, penilaian risiko, dan penanganan risiko.

Penyusunan dan Pemeliharaan: Prosedur untuk menyusun dan memelihara dokumen Piagam Manajemen Risiko ini.

Dengan adanya laporan Piagam Manajemen Risiko, organisasi dapat mengatur dan menjalankan manajemen risiko secara terstruktur dan efektif sesuai dengan komitmen dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.






DAKSHABOARDORGANISASIPROSES BISNISMANAJEMEN RISIKOLAPORANTENTANG APLIKASI

MAM KURNADI, S.E., M.AB, C.FRA, CRIPLOGOUT

BUKU MANAJEMEN RISIKO
LAPORAN PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
LAPORAN DAFTAR PENETAPAN KINERJA
LAPORAN DAFTAR RISIKO
LAPORAN RENCANA PENANGANAN RISIKO
LAPORAN REALISASI PENANGANAN RISIKO
LAPORAN DAFTAR RISIKO STRATEGIS PEMDA
LAPORAN DAFTAR RISIKO MITRA PD
LAPORAN DAFTAR RISIKO FRAUD
LAPORAN HASIL RIVU - INSPEKTORAT



PIAGAM MANAJEMEN RISIKO INSPEKTORAT DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SIMENTARI
SISTEM INFORMASI MONITORING MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko Inspektorat Daerah

Nama	Jabatan
Drs. Yutan Hebeli, M.Si N.I.P. : 196705051902031009 Jabatan : PB. Inspektur	Eselon 2
RADEN AJIANTI NURDIAH, S.P., M.T. N.I.P. : 197107091997032005 Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Eselon 3
DESI SINORITA, S.Kom N.I.P. : 1972001212002122004 Jabatan : Sekretaris	Eselon 3
DODY ROSMAWATI, SE., M.SE. N.I.P. : 197305182002121003 Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Eselon 3
YURISMAWATI, S.T., M.M. N.I.P. : 197405142007011031	Eselon 3



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SIMENTARI
SISTEM INFORMASI MONITORING MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Penetapan Konteks Manajemen Risiko Inspektorat Daerah

1. Tujuan
Penetapan Konteks Manajemen Risiko Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-parameter dasar sebagai pondasi dan batasan dalam penerapan Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Penanggung Jawab Pelaksanaan
Di tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, penyusunan penetapan konteks dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan penempatannya dilakukan oleh Komite Eksekutif.
3. Jadwal Pelaksanaan
Inspektorat Daerah menyusun penetapan konteks di tingkat Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif paling lambat pada minggu I di awal periode time horizon untuk dibahas dan ditetapkan. Penetapan konteks ditetapkan oleh Komite Eksekutif paling lambat pada minggu II di awal periode time horizon. Konteks tersebut harus ditinjau kembali secara berkala bersamaan dengan pelaksanaan risk assessment tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal terjadi perubahan organisasi pada periode berjalan, Komite Eksekutif dapat mengubah dan menyesuaikan konteks Manajemen Risiko tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui mekanisme pemantauan Risiko.
4. Langkah Proses
Penetapan konteks di tingkat Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter dasar di tingkat Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kerangka acuan dan parameter dasar tersebut mencakup antara lain: tujuan Inspektorat DaerahPemerintah Provinsi Sumatera Selatan, lingkup penerapan, periode time horizon, keluaran (output), struktur Manajemen Risiko, pemangku kepentingan, kriteria Risiko, matriks analisis Risiko untuk menentukan level Risiko dan prioritas Risiko, serta selera Risiko. Dengan demikian, konteks di tingkat Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi dasar dan batasan pengelolaan Risiko di tingkat Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Konteks Manajemen Risiko di lingkungan Inspektorat DaerahPemerintah Provinsi Sumatera Selatan diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis tingkat Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sasaran strategis tersebut merupakan representasi dari tujuan organisasi Inspektorat Daerah yang dijabarkan dalam rencana strategis, dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen resmi lainnya. Dengan demikian, siklus Proses Manajemen Risiko harus sejalan dengan proses penilaian kinerja dan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Langkah kerja dalam penetapan konteks di tingkat Inspektorat DaerahPemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 printed by - Inspektorat Daerah

8. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

E. Peraturan Terkait dengan Kewenangan dan TUPOKSI

- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
Tinggi Signifikan (1)	Jumlah kerugian negara > Rp10 Juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya > 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja > 100%	Pelayanan tertunda > 1 hari	Jumlah tuntutan hukum > 5 kali dalam satu periode
Minor (2)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d Rp50 Juta	Keluhan stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 90% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu periode
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu periode
Signifikan (4)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp100 Juta s.d Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu periode
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja > 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode

Halaman 5 dari 8 printed by - Inspektorat Daerah

3. LAPORAN DAFTAR PENETAPAN KINERJA: Daftar penetapan kinerja yang ditetapkan sebagai indikator efektivitas dari pelaksanaan manajemen risiko dalam organisasi.

Laporan Daftar Penetapan Kinerja adalah daftar indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran efektivitas dari pelaksanaan manajemen risiko dalam organisasi. Indikator kinerja ini membantu organisasi untuk mengukur sejauh mana manajemen risiko telah berhasil

dalam mencapai tujuan organisasi terkait manajemen risiko. Beberapa poin yang biasanya

Termasuk dalam laporan ini adalah:

Deskripsi Indikator: Penjelasan singkat tentang setiap indikator kinerja yang digunakan, termasuk definisi, cara pengukuran, dan satuan ukur yang digunakan.

Tujuan Indikator: Tujuan dari penggunaan indikator kinerja tersebut, serta bagaimana indikator tersebut akan membantu dalam mengukur efektivitas manajemen risiko.

Metode Pengukuran: Metode atau teknik yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja, serta frekuensi pengukuran yang dilakukan.

Tanggung Jawab Pelaporan: Unit atau individu yang bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pengukuran indikator kinerja tersebut.

Target Kinerja: Target atau standar yang ingin dicapai untuk setiap indikator kinerja, yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan.

Pemantauan dan Evaluasi: Prosedur untuk memantau dan mengevaluasi hasil pengukuran indikator kinerja tersebut, serta langkah-langkah yang akan diambil jika target kinerja tidak tercapai.

Dengan adanya laporan daftar penetapan kinerja, organisasi dapat mengukur secara objektif sejauh mana manajemen risiko telah berhasil dalam mencapai tujuan organisasi terkait manajemen risiko. Laporan ini juga dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian dalam implementasi manajemen risiko di masa mendatang.

**SI-MERI**
MONITORING MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DASHBOARDORGANISASIPROSES BISNISMANAJEMEN RISIKOLAPORANTENTANG APLIKASI

MAM KUSNIDI, S.E., M.AB., C.FRA., CRSPLOGOUT

BUKU MANAJEMEN RISIKO

LAPORAN PAGAM MANAJEMEN RISIKO

LAPORAN DAFTAR PENETAPAN KINERJA

LAPORAN DAFTAR RISIKO

LAPORAN RENCANA PENANGANAN RISIKO

LAPORAN REALISASI PENANGANAN RISIKO

LAPORAN DAFTAR RISIKO STRATEGIS PEMDA

LAPORAN DAFTAR RISIKO MITRA PD

LAPORAN DAFTAR RISIKO FRAUD

LAPORAN HASIL RIBU - INSPEKTORAT

SUMATERA SELATAN

LAPORAN DAFTAR PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

Pilih Tahun
-- Semua --

E-worK PSPExport Excel

No	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Sasaran Kinerja Pegawai / Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Target Mutu	Target Waktu	Target Biaya	Proses Bisnis	Tahun	
1	Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BROKRASI)	100%	0	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pembiayaan Reformasi Birokrasi	10	85%	6 Bulan	0	Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BROKRASI)	2021	
									Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BROKRASI)	2021	
				Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota yang berada di Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2	Laporan	85%	6 bulan	0	Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BROKRASI)	2021
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang berada di Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	35	Laporan	90%	6 bulan	0	Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BROKRASI)	2021
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang berada di Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1	Laporan	85%	6 Bulan	0	Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BROKRASI)	2021
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang berada di Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	6	LHP	85%	6 bulan	0	Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BROKRASI)	2021
									Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BROKRASI)	2021	
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang berada di Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11	LHP	85%	6 bulan	0	Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BROKRASI)	2021
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Laporan	85%	6 bulan	0	Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BROKRASI)	2021
									Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BROKRASI)	2021	
									Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BROKRASI)	2021	
									Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BROKRASI)	2021	



No	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Sasaran Kinerja Pegawai/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Target Mutu	Target Waktu	Target Biaya	Proses Bisnis	Nama Risiko
1	Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BIROKRASI)	100%	0,00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	85%	6 Bulan	0,00	Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) dan Perangkat Daerah	Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) terlambat dikumpulkan oleh Tim Evaluator
				Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota yang berada di Inspektor Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 Laporan	85%	6 bulan	0,00	Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) OPO	Nilai RB tidak tercapai
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang berada di Inspektor Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	35 Laporan	90%	6 bulan	0,00	Pengumpulan obrik dan pengolahan data pemeriksaan dari Kab/Kota	Keterlambatan dalam pengumpulan dan pengolahan data Obrik
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang berada di Inspektor Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan	85%	6 Bulan	0,00	Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	Terlambatnya Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang berada di Inspektor Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	8 LHP	85%	6 bulan	0,00	Penyampaian Laporan Hasil Reviu Keuangan	Laporan Hasil Reviu Terlambat disampaikan
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang berada di Inspektor Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11 LHP	85%	6 bulan	0,00	Perencanaan Anggaran	Pejabat menetapkan kebijakan sesuai kehendak pribadi
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	85%	6 bulan	0,00	Evaluasi LAKIP PD	LAKIP PD Terlambat Dikumpulkan oleh Tim Evaluasi
									Pelaksanaan Pengawasan audit investigasi	mendapatkan intimidasi atau rawan gratifikasi
									Pelaksanaan Pengawasan audit investigasi	Tim pemeriksa gagal mengidentifikasi penyimpangan
									Pelaksanaan Pengawasan audit investigasi	rekomendasi audit/pemeriksa tidak dapat ditindaklanjuti
									Pelaksanaan Pengawasan audit investigasi	dokumen pendukung LHP tidak lengkap (Hilang (KKP, expose, data dukung)
									Pembentukan Tim Audit Investigasi	kuualitas dan kuantitas tim pemeriksa masih belum optimal
									Pembentukan Tim Audit Investigasi	penolakan untuk melakukan audit investigasi
									Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Laporan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa tidak tepat sasaran
									Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Obrik yang mau dilakukan pemeriksaan tidak tepat sasaran
									Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Pengaduan masyarakat belum selesai ditangani
									Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Penanganan tidak bisa dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi
									Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	pelaksanaan dan penerbitan LHP tidak tepat waktu
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang berada di Inspektor Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi	6 Laporan	85%	6 bulan	0,00	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan belum sesuai aturan
									Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Prov dan Kab./ Kota	LPPD/LPPD Terlambat Dikumpulkan oleh Satgas
									Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Prov dan Kab./ Kota	Isian template belum memadai sesuai pedoman
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Dokumen	85	2021	0,00	Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR	TP-TGR tidak dapat ditindaklanjuti secara optimal
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APH yang berada di Inspektor Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi	2 Laporan	85 %	2021	0,00	Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi audit tidak dapat ditindaklanjuti
									Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD terlambat menindaklanjuti LHP



4. LAPORAN DAFTAR RISIKO: Daftar risiko yang telah diidentifikasi dalam organisasi, termasuk deskripsi risiko, tingkat kemungkinan terjadinya, dan dampak potensialnya.

Laporan Daftar Risiko adalah daftar risiko yang telah diidentifikasi dalam organisasi, lengkap dengan deskripsi risiko, tingkat kemungkinan terjadinya, dan dampak potensialnya. Laporan ini membantu organisasi untuk memahami risiko-risiko yang dihadapi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola risiko tersebut. Beberapa poin yang biasanya termasuk dalam laporan ini adalah:

Deskripsi Risiko: Penjelasan singkat tentang risiko tersebut, termasuk penyebab, sumber, dan konteksnya.

Kategori Risiko: Klasifikasi risiko ke dalam kategori-kategori tertentu, seperti risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi, dan lain-lain.

Tingkat Kemungkinan: Estimasi tentang seberapa sering risiko tersebut mungkin terjadi, seringkali dinyatakan dalam skala seperti rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi.

Dampak Potensial: Estimasi tentang seberapa besar dampak negatif risiko tersebut jika terjadi, seringkali dinyatakan dalam skala seperti rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi.

Tindakan Mitigasi: Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko, serta pihak yang bertanggung jawab dan waktu pelaksanaannya.

Indikator Program:	Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BIROKRASI)				
Indikator Kegiatan:	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				
No	Tahapan Kegiatan/Proses Bisnis	Uraian Risiko	Kemungkinan	Dampak	Risiko
1	Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) dari Perangkat Daerah	Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) terlambat dikumpulkan oleh Tim Evaluator PIC : RADEN JULIANTI NURDJANNAH, S.IP.,M.T.	3	3	9 Rendah
2	Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) OPD	Nilai RB tidak tercapai PIC : RADEN JULIANTI NURDJANNAH, S.IP.,M.T.	1	3	3 Sangat Rendah
Total			4,00	6,00	12,00
Rata-rata Risiko Tertimbang			2,00	3,00	6,00 Sangat Rendah

Drs. Yunan Helmi, M.Si
NIP. 196705051992031009

Dengan adanya laporan daftar risiko, organisasi dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara lebih efektif, sehingga dapat mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan organisasi.

LAPORAN RENCANA PENANGANAN RISIKO: Dokumen yang merinci langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola risiko tertentu, termasuk waktu mulai, waktu selesai, dan indikator keberhasilan.

Laporan Rencana Penanganan Risiko adalah dokumen yang merinci langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola risiko tertentu. Dokumen ini mencakup informasi tentang waktu mulai, waktu selesai, dan indikator keberhasilan dari rencana penanganan risiko tersebut. Beberapa poin yang biasanya termasuk dalam laporan ini adalah:

Deskripsi Risiko: Risiko yang akan ditangani, termasuk penyebab, sumber, dan dampaknya.

Tujuan Penanganan Risiko: Tujuan yang ingin dicapai melalui rencana penanganan risiko tersebut, seperti mengurangi dampak risiko atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko.

Langkah-langkah Mitigasi: Langkah-langkah spesifik yang akan diambil untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko, termasuk pihak yang bertanggung jawab dan waktu pelaksanaannya.

Waktu Mulai dan Selesai: Tanggal atau periode waktu ketika langkah-langkah mitigasi akan dimulai dan selesai dilaksanakan.

Indikator Keberhasilan: Kriteria atau parameter yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan dari rencana penanganan risiko, serta cara mengukurnya.

Pemantauan dan Evaluasi: Prosedur untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah mitigasi yang diambil, serta langkah-langkah yang akan diambil jika rencana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Tanggung Jawab Pelaksana: Pihak atau tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi.

Dengan adanya laporan rencana penanganan risiko, organisasi dapat mengelola risiko secara lebih efektif dengan memiliki rencana yang terstruktur dan terukur. Hal ini dapat membantu organisasi untuk mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan organisasi.

LAPORAN RENCANA PENANGANAN RISIKO INSPEKTORAT DAERAH										
BUKU MANAJEMEN RISIKO LAPORAN PAGAM MANAJEMEN RISIKO LAPORAN DAFTAR PENETAPAN KINERJA LAPORAN DAFTAR RISIKO LAPORAN RENCANA PENANGANAN RISIKO LAPORAN REALISASI PENANGANAN RISIKO LAPORAN DAFTAR RISIKO ST RATEGI PEMDA LAPORAN DAFTAR RISIKO MITRA PD LAPORAN DAFTAR RISIKO FRAUD LAPORAN HASIL RIVU - INSPEKTORAT 										
Pilih Tahun -- Semua -- Export PDF Export Excel										
No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan Yang Sudah Ada	Rencana Penanganan	Tanggal Rencana	Indikator Output	Anggaran
1	Korupsi kepengertian	Keterlambatan mitra dalam melakukan kegiatan yang bersinggung atau bertentangan dengan PD. Keterlambatan dalam proses pengendalian atau pengawasan mitra yang dapat merugikan mitra. Keterlambatan dalam proses pengendalian atau pengawasan mitra yang dapat merugikan mitra.	2	2	4	Korupsi kepengertian yang diadukan. Melakukan prosedur pengendalian korupsi kepengertian yang jelas dan akurat. Melakukan prosedur pengendalian korupsi kepengertian yang jelas dan akurat. Melakukan prosedur pengendalian korupsi kepengertian yang jelas dan akurat.		tanggal mulai tanggal selesai		0
2	Keterlambatan sumber daya keuangan	Risiko keuangan yang paling umum adalah keterlambatan sumber daya keuangan yang dapat mempengaruhi kemampuan mitra pemerintah dalam melakukan kegiatan proyek atau tugas yang ditugaskan.	2	3	6			tanggal mulai tanggal selesai		0
3	Kelambatan pembayaran pengisian dinas	PPH dan PPTK kurang melakukan proses pengisian dokumen administrasi belanja.	3	2	6	pemeriksaan dokumen belanja lebih dari satu membuat kartu kendali.		tanggal mulai tanggal selesai		0
4	penyediaan risiko	tidak ada pemahaman	1	3	3	pengendalian		tanggal mulai tanggal selesai		0
5	Penanganan hukum pengendalian	Kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan pengendalian yang berlaku. Kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan pengendalian yang berlaku. Kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan pengendalian yang berlaku.	2	2	4	Hakuluan hukum dan regulasi. Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait pengendalian yang memuat hukum dan regulasi yang berlaku. Melakukan pemeriksaan dan audit. Melakukan pemeriksaan dan audit. Melakukan pemeriksaan dan audit.		tanggal mulai tanggal selesai		0


 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 SISTEM INFORMASI MONITORING MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

DAFTAR RENCANA PENANGANAN RISIKO INSPEKTORAT DAERAH



PIC: YURISMANSYAH, S.T.,M.M.
PD : Inspektorat Daerah
Jumlah Risiko: 22

No	Risiko	Penyebab	Risiko Inherent	Penanganan Yang Sudah Ada	Rencana Penanganan	Pelaksanaan	Indikator Output	Anggaran
1	Laporan capaian kinerja dan keuangan belum sesuai aturan Kode Risiko : ROO-21-1109-22	keterlambatan penyampaian data dan belum sempurna	K = 3 D = 3 TR = 9 Rendah	format data-data yang perlu diisi	monitoring ke bidang terkait	03 Jan 2022 s.d 30 Des 2022 Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Laporan capaian kinerja dan keuangan sudah sesuai aturan	0,00
2	pelaksanaan dan penerbitan LHP tidak tepat waktu Kode Risiko : RISK-21-1102-22	SOP tidak dilaksanakan dengan baik	K = 3 D = 3 TR = 9 Rendah	SPIP dari pimpinan ke tim pemeriksa agar tepat waktu	komitmen pimpinan dan seluruh JFT Tim pemeriksa dan penguatan SOP	03 Jan 2022 s.d 30 Des 2022 Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Laporan Hasil Pemeriksaan	0,00
3	LPPDPD Terlambat Dikumpulkan oleh Satgas Kode Risiko : RISK-21-1110-22	LPPDPD tidak disampaikan oleh Kab/Kota	K = 3 D = 3 TR = 9 Rendah	Menyurati Kabupaten dan Kota untuk menyampaikan LPPDPD	Sosialisasi kepada Petugas Kabupaten dan Kota	03 Jan 2022 s.d 30 Des 2022 Triwulan 1 s.d Triwulan 4	LPPDPD Kabupaten dan Kota Terlambat Dikumpulkan tepat waktu	0,00
4	Isian template belum memadai sesuai pedoman Kode Risiko : ROO-21-1111-22	Tenaga teknis pelaksana evaluasi belum ahli dalam evaluasi gunakan Template	K = 3 D = 3 TR = 9 Rendah	Pelatihan kepada Tim evaluator	Bimtek kepada Tim Evaluator	03 Jan 2022 s.d 30 Des 2022 Triwulan 1 s.d Triwulan 4	Isian template sudah sesuai pedoman	0,00

5. LAPORAN REALISASI PENANGANAN RISIKO: Dokumen yang mencatat pelaksanaan langkah-langkah penanganan risiko yang direncanakan, termasuk waktu mulai, waktu selesai, dan evaluasi efektivitasnya.



PIC: DESI SINORITA, S.Kom. - Inspektorat Daerah	Risiko inherent	Risiko residu	Capaian penanganan
Rata-rata risiko	10.33	3.67	Penanganan Efektif
Tren Risiko - Penurunan sebesar 6.67 Point atau 64.52%			

Risiko	Prioritas Penanganan	Penanganan Yang Akan Dilakukan	Rencana	Inherent Risk	Realisasi	Residual Risk	Indikator Output	Anggaran	Hambatan	Keterangan
PIC: DESI SINORITA, S.Kom. - Inspektorat Daerah										
Ketidaksesuaian Laporan Keuangan pada SIMDA dan SIPD Kode Risiko : RSO-21-1020-22	1	Melakukan Koordinasi dengan BAKUDA dan BAPPELITBANGDA	TW 1 dari 01 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022	16 Tinggi	TW 3 s.d TW 4 dari 01 Juli 2022 s.d 30 Desember 2022	2 Sangat Rendah	Laporan Keuangan antara SIMDA dan SIPD sudah sesuai	0,00	-	Tren Turun Status Open Penanganan sudah direalisasikan
Tidak terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Kode Risiko : RISK-21-1023-22	2	Melaksanakan Koordinasi dengan BAKUDA dan BAPPELITBANGDA untuk menambah anggaran SAPRAS Kantor	TW 2 dari 02 Mei 2022 s.d 02 Juni 2022	12 Sedang	TW 3 s.d TW 4 dari 01 Juli 2022 s.d 30 Desember 2022	6 Rendah	Penyediaan SAPRAS yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional pada inspektorat	0,00	-	Tren Turun Status Open Penanganan sudah direalisasikan
ketidakselarasan Renstra Inspektorat dengan RPJMD Kode Risiko : RSO-21-1019-22	3	Diklat Subtantif Kassubag Perencanaan	TW 2 dari 04 April 2022 s.d 08 April 2022	12 Sedang	TW 3 s.d TW 4 dari 01 Juli 2022 s.d 30 Desember 2022	6 Rendah	Terlaksananya Diklat Subtantif bagi kassubag perencanaan	0,00	-	Tren Turun Status Open Penanganan sudah direalisasikan

6. LAPORAN DAFTAR RISIKO STRATEGIS PEMDA: Daftar risiko strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, termasuk risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan program-program PEMDA.

Laporan Daftar Risiko Strategis PEMDA adalah dokumen yang memuat daftar risiko-risiko strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Dokumen ini mencakup risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan program-program Pemerintah Daerah serta langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mengelola risiko tersebut. Beberapa poin yang biasanya termasuk dalam laporan ini adalah:

Daftar Risiko: Risiko-risiko strategis yang diidentifikasi, beserta deskripsi singkat tentang masing-masing risiko.

Kategori Risiko: Risiko-risiko tersebut biasanya diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu, seperti risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi, dan lain-lain.

Penyebab Risiko: Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya risiko tersebut, termasuk faktor internal dan eksternal.

Dampak Risiko: Dampak yang mungkin terjadi jika risiko tersebut terwujud, baik dari segi keuangan, operasional, reputasi, maupun legal.

Probabilitas Terjadinya: Tingkat kemungkinan terjadinya risiko, yang sering kali diukur dengan skala seperti rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi.

Tindakan Mitigasi: Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mengurangi dampak dan/atau kemungkinan terjadinya risiko, termasuk pihak yang bertanggung jawab dan waktu pelaksanaannya.

Pemantauan dan Evaluasi: Rencana untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah mitigasi yang diambil, serta kapan dan bagaimana laporan tersebut akan disusun kembali.

Laporan ini penting untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memahami dan mengelola risiko-risiko strategis yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan dan program-programnya. Dengan memperhatikan laporan ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola risiko-risiko tersebut secara efektif.

DASHBOARD

ORGANISASI

PROSES BISNIS

MANAJEMEN RISIKO

LAPORAN

TENTANG APLIKASI

HELPDESK MR

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LOGOUT

BUKU MANAJEMEN RISIKO

LAPORAN PAGAM MANAJEMEN RISIKO

LAPORAN DAFTAR PENETAPAN KINERJA

LAPORAN DAFTAR RISIKO

LAPORAN RENCANA PENANGANAN RISIKO

LAPORAN REALISASI PENANGANAN RISIKO

LAPORAN DAFTAR RISIKO STRATEGIS PEMDA

LAPORAN DAFTAR RISIKO MITRA PD

LAPORAN DAFTAR RISIKO FRAUD

LAPORAN HASIL RIMU - INSPEKTORAT

LAPORAN DAFTAR RISIKO STRATEGIS PEMDA PADA INSPEKTORAT DAERAH

Pilih Tahun

-- Semua --

Export PDF

Export Excel

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Risiko	Rencana Penanganan	Mulai	Selesai	Indikator Output	PIC	Anggaran	Real Mulai	Real Selesai	Risk Residual	Hambatan	Keterangan
1	Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BIROKRASI)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Nilai RB tidak tercapai						0					Trend Risiko Status Risiko



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SISTEM INFORMASI MONITORING MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Daftar Risiko Strategis PEMDA pada- Inspektorat Daerah

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Risiko	Kode Risiko	Prioritas Penanganan	Penanganan Yang Akan Dilakukan	Rencana	Inherent Risk	Realisasi	Residual Risk	Indikator Output	PIC	Anggaran	Hambatan	Keterangan
1	Memajukan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas (INDEKS REFORMASI BIROKRASI)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Nilai RB tidak tercapai	RSP-21-386-22	1		Mulai : Selesai :	3 Sangat Rendah	Mulai : Selesai :	tidak terdefinisi			0,00		Tren Status Penanganan belum direalisasikan

Palembang, 03 - Feb - 2025
Inspektorat Daerah
Plt. Inspektur,



Drs. Yunan Helmi, M.Si
NIP. 196705051992031009

7. LAPORAN DAFTAR RISIKO MITRA PD: Daftar risiko yang terkait dengan mitra atau pihak lain yang bekerja sama dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program-program atau proyek-proyek tertentu.

Laporan Daftar Risiko Mitra PD adalah dokumen yang mencatat risiko-risiko yang terkait dengan mitra atau pihak lain yang bekerja sama dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program-program atau proyek-proyek tertentu. Dokumen ini membantu Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul dari kerjasama dengan mitra. Beberapa poin yang biasanya termasuk dalam laporan ini adalah:

Deskripsi Mitra: Identifikasi mitra atau pihak lain yang bekerja sama dengan Perangkat Daerah.

Deskripsi Risiko: Penjelasan singkat tentang risiko-risiko yang terkait dengan kerjasama dengan mitra, termasuk penyebab, sumber, dan dampaknya.

Kategori Risiko: Klasifikasi risiko ke dalam kategori-kategori tertentu, seperti risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi, dan lain-lain.

Tingkat Kemungkinan: Estimasi tentang seberapa sering risiko tersebut mungkin terjadi, seringkali dinyatakan dalam skala seperti rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi.

Dampak Potensial: Estimasi tentang seberapa besar dampak negatif risiko tersebut jika terjadi, seringkali dinyatakan dalam skala seperti rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi.

Penilaian Risiko: Penilaian secara keseluruhan tentang tingkat risiko yang dihadapi, berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampak.

Prioritas Risiko: Penetapan prioritas risiko berdasarkan penilaian risiko, untuk menentukan risiko mana yang harus diutamakan dalam pengelolaan risiko.

Tindakan Mitigasi: Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko, serta pihak yang bertanggung jawab dan waktu pelaksanaannya.

DASHBOARDORGANISASIPROSES BISNISMANAJEMEN RISIKOLAPORANTENTANG APLIKASIHLPDESK MRINSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGLOGOUT

BUKU MANAJEMEN RISIKO
LAPORAN PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
LAPORAN DAFTAR PENETAPAN KINERJA
LAPORAN DAFTAR RISIKO
LAPORAN RENCANA PENANGANAN RISIKO
LAPORAN REALISASI PENANGANAN RISIKO
LAPORAN DAFTAR RISIKO STRATEGIS PEMDA
LAPORAN DAFTAR RISIKO MITRA PD
LAPORAN DAFTAR RISIKO FRAUD
LAPORAN HASIL RIMU - INSPEKTORAT

LAPORAN DAFTAR RISIKO MITRA PADA INSPEKTORAT DAERAH

Pilih Tahun
-- Semua --
Export PDFExport Excel

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Risiko	Rencana Penanganan	Mata	Selera	Indikator Output	PIC	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Risk Residual	Hambatan	Keterangan
Tidak Ada Data Risiko														

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
SISTEM INFORMASI MONITORING MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Daftar Risiko Mitra pada- Inspektorat Daerah

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Risiko	Kode Risiko	Prioritas Penanganan	Penanganan Yang Akan Dilakukan	Rencana	Inherent Risk	Realisasi	Residual Risk	Indikator Output	PIC	Anggaran	Hambatan	Keterangan
----	-------------------	------------------	--------	-------------	----------------------	--------------------------------	---------	---------------	-----------	---------------	------------------	-----	----------	----------	------------

Pangkalpinang, 16 - May - 2024
Inspektorat Daerah
Inspektur,

MUHAMAD SYAHRIL
NIP. 197107132005011006

Dengan adanya laporan daftar risiko mitra PD, Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan kerjasama dengan mitra secara lebih efektif, sehingga dapat mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan kerjasama tersebut.

- LAPORAN DAFTAR RISIKO FRAUD:** Daftar risiko terkait dengan potensi terjadinya kecurangan dalam organisasi, termasuk risiko-risiko yang berkaitan dengan kecurangan internal dan eksternal.

Laporan Daftar Risiko Fraud adalah dokumen yang mencatat risiko-risiko terkait dengan potensi terjadinya kecurangan dalam organisasi. Dokumen ini mencakup risiko-risiko yang berkaitan dengan kecurangan internal (dari dalam organisasi) dan eksternal (dari pihak luar organisasi). Beberapa poin yang biasanya termasuk dalam laporan ini adalah:

Deskripsi Risiko: Penjelasan singkat tentang risiko-risiko yang terkait dengan potensi terjadinya kecurangan, termasuk penyebab, sumber, dan dampaknya.

Kategori Risiko: Klasifikasi risiko ke dalam kategori-kategori tertentu, seperti kecurangan

keuangan, kecurangan operasional, kecurangan korporat, dan lain-lain.

Tingkat Kemungkinan: Estimasi tentang seberapa sering risiko kecurangan tersebut mungkin terjadi, seringkali dinyatakan dalam skala seperti rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi.

Dampak Potensial: Estimasi tentang seberapa besar dampak negatif risiko kecurangan tersebut jika terjadi, seringkali dinyatakan dalam skala seperti rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi.

Penilaian Risiko: Penilaian secara keseluruhan tentang tingkat risiko kecurangan yang dihadapi, berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampak.

Prioritas Risiko: Penetapan prioritas risiko kecurangan berdasarkan penilaian risiko, untuk menentukan risiko mana yang harus diutamakan dalam pengelolaan risiko.

Tindakan Mitigasi: Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko kecurangan, serta pihak yang bertanggung jawab dan waktu pelaksanaannya.

Dengan adanya laporan daftar risiko fraud, organisasi dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko terkait dengan potensi terjadinya kecurangan dengan lebih baik, sehingga dapat mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan keandalan sistem pengendalian intern dalam organisasi.

DASHBOARD

ORGANISASI

PROSES BISNIS

MANAJEMEN RISIKO

LAPORAN

TENTANG APLIKASI

HELPDESK MR

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LOGOUT

BUKU MANAJEMEN RISIKO

LAPORAN PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

LAPORAN DAFTAR PENETAPAN KINERJA

LAPORAN DAFTAR RISIKO

LAPORAN RENCANA PENANGANAN RISIKO

LAPORAN REALISASI PENANGANAN RISIKO

LAPORAN DAFTAR RISIKO STRATEGIS PEMDA

LAPORAN DAFTAR RISIKO MITRA PD

LAPORAN DAFTAR RISIKO FRAUD

LAPORAN HASIL RIVU - INSPEKTORAT

LAPORAN DAFTAR RISIKO FRAUD INSPEKTORAT DAERAH

Pilih Tahun

-- Semua --

Export PDF

Export Excel

No	Indikator Kinerja	Kepala	Proses Bisnis	Pemetaan Risiko	Skenario Risiko	Pemilik Risiko	Kategori Risiko Fraud	Penanggung Jawab	Kategori Pengendalian Risiko Fraud	Pengendalian yang Sudah Ada	Skala Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat	Status	Respon Mitigasi
1	Memujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkeadilan (REDES REFORMASI BIKORASI)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang berada di bawah Pemantauan Biotang Pengawasan Keuangan dan Aset	Pengendalian Anggaran	Pajakat mendapatkan seluruh sesuai terhadap pribadi.	1. Kapasitas PD memuat target pendapatan dan beban di luar dari kemampuan PD sehingga menimbulkan tekanan untuk berbuat kecurangan. 2. Tidak ada tanggap terhadap pihak tertentu dalam penyusunan DPA. 3. RKA untuk kegiatan pribadi/golongan tertentu.	Inspektoral Daerah	Bantuan Kelembagaan	1. Adanya beban untuk belanja barang dan jasa pada perusahaan tertentu. 2. Adanya keinginan untuk mendapatkan bonus atau prestasi kinerja yang tidak sesuai dengan disiplin selamatan. 3. Adanya bantuan pada proses penyusunan RKA DPA. 4. Adanya ketidakakuratan pihak yang terlibat dalam penyusunan RKA DPA.	Tahanan	1. Penyusunan DPA-RKA mengacu kepada RBLUA, dan RPAAD. 2. Penerimaan Babel. 2. Kontrol dari pembekuan target kinerja PD bersama dengan PD terkait.	-	2	3	5	1. PD gagal dalam menjalankan Program kegiatan. 2. Pemenuhan pada Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. 3. Adanya pemenuhan hukum.	Melakukan PD terkait dalam penyusunan DPA-RKA.



Indikator Program:		Risiko Fraud (FRA) Inspektorat			
Indikator Kegiatan:		Perencanaan Kegiatan			
No	Tahapan Kegiatan/Proses Bisnis	Uraian Risiko	Kemungkinan	Dampak	Risiko
1	Perencanaan Anggaran	kemungkinan adanya manipulasi data pendukung anggaran PIC : SUSANTO, S.E., Ak.CA., M.M.	2	3	6 Rendah
2	Perencanaan Penyusunan Anggaran	Gratifikasi dalam rangka penyusunan anggaran PIC : IMAM KUSNADI, S.E., M.AB.,CFrA, CRGP	2	3	6 Rendah
Total			4,00	6,00	12,00
Rata-rata Risiko Tertimbang			2,00	3,00	6,00 Rendah

Palembang, 03 - Feb - 2025
Inspektorat Daerah
Plt. Inspektur,

Drs. Yunan Helmi, M.Si
NIP. 196705051992031009



dicetak oleh Inspektorat Daerah
SIMENTARI - 03 - Feb - 2025

Halaman 2 dari 13

9. LAPORAN HASIL RIVIU - INSPEKTORAT: Laporan hasil review dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko dalam organisasi.

Laporan Hasil Review dan Evaluasi oleh Inspektorat terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko dalam organisasi adalah dokumen yang berisi hasil dari review dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap implementasi manajemen risiko dalam organisasi. Beberapa poin yang biasanya termasuk dalam laporan ini adalah:

Tujuan dan Lingkup Review: Penjelasan tentang tujuan dari review dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat serta ruang lingkup dari review tersebut.

Metodologi: Penjelasan tentang metode atau pendekatan yang digunakan oleh Inspektorat dalam melakukan review dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko dalam organisasi.

Hasil-hasil yang ditemukan oleh Inspektorat selama review dan evaluasi, termasuk identifikasi masalah atau kelemahan dalam implementasi manajemen risiko.

Rekomendasi: Rekomendasi dari Inspektorat mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh organisasi untuk memperbaiki atau memperkuat implementasi manajemen

risiko.

Tindak Lanjut: Langkah-langkah yang diambil oleh organisasi sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat, termasuk pihak yang bertanggung jawab dan waktu pelaksanaannya.

Laporan ini penting karena memberikan masukan yang berharga bagi organisasi untuk memperbaiki atau memperkuat implementasi manajemen risiko mereka. Dengan memperhatikan temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat, organisasi dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko mereka dan mengurangi potensi kerugian yang dapat terjadi.

INSPEKTORAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN



Jalan Kapten A. Rivai No 3 Palembang
Provinsi Sumatera Selatan